

ISSN No. 0853 - 5922

ekstensia

Edisi Khusus DAFEP Volume 19 Tahun X, Nopember 2003



DAFEP

MEMBANGUN SISTEM PENYULUHAN
PERTANIAN PARTISIPATIF

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN REDAKSI MAJALAH EKSTENSIA

- I. Pelindung : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- II. Penanggungjawab : Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
- III. Pengarah Materi : 1. Ir. M. Ridha Ismail
2. Ir. Diana Prasastyawati, M.Si.
3. Ir. Nanay Jubaida
- IV. Tim Penyunting :
Ketua : Ir. Farida Salim, M.Ed.
Sekretaris : Ir. Andi Sumarga
Anggota : 1. Ir. Zahir Zachri, MA
2. Ir. Subagio
3. Ir. Abdullah Syarief
4. Ir. Hotman
5. Ir. Sumardi
6. Ir. Bambang Gatut N, M.Si.
7. Ir. Syarifuddin Hattab
8. Ir. Ranny Mutiara
9. Drs. Ridwan
10. Ir. Lasarus Kanisius Ladja, MM
- V. Administrasi : Ir. Sri Damayanti, M.Ed; M.Phil
- VI. Keuangan : Drs. Rodhi
- VII. Distribusi : Ir. Hasan Latuconsina

Salam dari redaksi

Salam bahagia, untuk para pembaca Ekstensia DAFEP yang selalu ingin membaca artikel-artikel pada sajian Ekstensia Khusus DAFEP. Sajian artikel pada Ekstensia Khusus DAFEP ada yang kami angkat dari liputan langsung di wilayah binaan DAFEP dan ada pula kami angkat dari laporan-laporan pelaksanaan DAFEP.

Para pembaca setia Ekstensia Khusus DAFEP, DAFEP merupakan model program atau proyek dibidang pendidikan masyarakat yang dapat dianalogikan sebagai kurikulum pendidikan masyarakat petani yang berkaitan secara langsung dengan masalah pembangunan moral bangsa. Tujuan akhir atau cita-cita yang terkandung dalam konsep DAFEP ialah mewujudkan petani sebagai warga negara terhormat yang bebas, merdeka dan menjadi subyek pembangunan yang mandiri, dinamis, kreatif, berkemampuan, berorientasi ke depan dan memiliki daya saing yang tinggi dalam berusahataniya.

Pelatihan petani merupakan unsur terpenting dalam proses pendidikan petani (penyuluhan) karena dalam konsep DAFEP pelatihan petani merupakan tindakan stimulan kepada petani untuk menggugah dan membangun kemampuan kognisi, afeksi dan psikomotor serta aspek konasi petani agar tergerak bangkit menjadi manusia pembelajar, dan secara komunitas akan terbangun menjadi masyarakat pembelajar.

Para pembaca yang setia, untuk itu silakan anda simak artikelnya pada rubrik-rubrik yang tersedia di majalah Ekstensia ini yang sengaja kami sajikan khusus untuk para pembaca majalah Ekstensia.

Dapat anda simak artikel tentang bagaimana memahami konsep DAFE (Decentralized Agricultural and Forestry Extension), apa dan bagaimana menerapkan konsep DAFEP di desa Seloprojo. Apa betul UPKG beda dengan kelompok lain ? Artikel lainnya, bagaimana menjalin kolaborasi yang berujung prestasi. Bagaimana sosok ketua UPKG. Serta artikel tentang pelatihan petani untuk pemberdayaan petani dalam konsep DAFE-P. Dan masih ada artikel-artikel lainnya yang dapat anda baca.

Akhirnya kami mengucapkan selamat kepada anda untuk membaca Ekstensia Khusus DAFEP. Semoga berkenan di hati.

Selamat membaca

GAPURA	1
DAFTAR ISI	2
OPINI	
Agroforestry menghasilkan udara bersih dan segar	3
Memperkuat kelembagaan penyuluhan pertanian daerah Kabupaten/Kota melalui Pelayanan Informasi dan Teknologi Petani	6
Memahami konsep : DAFE (Decentralized Agricultural and Forestry Extension)	14
PROGRAM	
DAFEP di Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, Jawa Tengah	28
Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP di Era Otonomi Daerah	34
WAHANA	
Sekretariat UPKG Kuripan Selatan. Sebelumnya bernama Balai Pertemuan Petani	40
UPKG beda dengan kelompok lain	33
Kolaborasi pun berujung prestasi	46
SOSOK	
Sunarto, Ketua UPKG Deyangan	51
DAFEP di mata penyuluh	54
Titisan Kartini dari Tanah Timor (Perspektif Gender : sebuah pengalaman)	57
WAWASAN	
Pestisida alami UPKG Kebonagung, Imogiri, Bantul	59
Pelatihan petani untuk pemberdayaan petani dalam konsep DAFE-P	61
GEMA	
Apresiasi Pelatihan Lanjutan bagi Koordinator FMA Tingkat Kabupaten	68
Lokakarya Perencanaan Model Penyuluhan Pertanian dalam Pemberdayaan Wanita Tani dan Pemuda Tani di Kabupaten Kupang	73
Temu Usaha, Kemitraan dan Pembentukan Jaringan Program PHRD-DAFEP Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	75
DAFEP dalam gambar	76

AGROFORESTRY MENGHASILKAN UDARA BERSIH DAN SEGAR

Agroforestry merupakan suatu kegiatan manajemen pengelolaan lahan, dimana petani dapat mengatur mulai dari sistem tanam dari berbagai komoditi sampai pada panen hasil, sehingga kontinuitas produksi dapat terlaksana dengan baik dan kelestarian lingkungan dapat dijaga.

Ir. Nur Hidayat

(Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan)

Pertanian dan kehutanan merupakan sektor yang penting bagi kehidupan bangsa kita. Keduanya harus berjalan bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia, sampai saat ini merupakan salah satu sektor andalan bagi perekonomian negara kita.

Namun pada umumnya usaha pertanian masih dilakukan secara tradisional, dikerjakan pada lahan-lahan yang sempit dan pemanfaatan lahannya tidak optimal, sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya itu sendiri, bahkan kadang-kadang tidak mencukupi.

Sektor kehutanan, juga perlu diperhatikan dan dikembangkan, masih banyak orang yang belum mengerti fungsi dan manfaat hutan. Kegiatan kehutanan dapat dikembangkan di dalam dan di luar kawasan hutan. Kegiatan kehutanan yang dapat dikembangkan di luar kawasan hutan adalah *agroforestry* dimana kegiatan ini merupakan perpaduan antara tanaman pertanian, perkebunan dan tanaman kehutanan berupa kayu. Kegiatan ini telah

banyak dikembangkan masyarakat terutama di pulau Jawa. Kegiatan agroforestry merupakan suatu manajemen pengelolaan lahan, dimana petani dapat mengatur mulai dari sistem tanam dari berbagai komoditi sampai pada panen hasil, sehingga kontinuitas produksi dapat terlaksana dengan baik dan kelestarian lingkungan dapat terjaga.

Selain hutan berfungsi sebagai penyedia kayu dan berbagai hasil ikutan lainnya seperti getah, rotan, madu, dll. Disamping itu, hutan juga sebagai pengatur tata air, pengendali banjir, pencegah erosi. Hijauan pepohonan dan pakan ternak menghasilkan udara yang bersih dan segar yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berikut ini uraian wawancara dengan Ir. Nur Hidayat sebagai Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan.

Bagaimana bentuk orientasi kebijaksanaan pembangunan kehutanan dikaitkan dengan kebijakan DAFEP, kelestarian sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan ?

Kebijaksanaan pembangunan kehutanan, sekarang ini telah bergeser dari orien-

tasi konglomerasi ke orientasi sosial kerakyatan. Aspek sosial dan budaya masyarakat serta aspek kelestarian lingkungan memperoleh porsi perhatian yang tinggi dalam pelaksanaan program-program pembangunan kehutanan. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sumber daya hutan secara lestari, pemerintah akan mengembangkan program sosial forestry, yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanpa merubah status dan pemilikan kawasan hutan tersebut. Pada dasarnya program ini intinya adalah mengelola hutan dengan memberikan manfaat sosial ekonomi masyarakat, dengan prinsip hutan tetap lestari, tanpa merubah status dan kepemilikan kawasan hutan yang dikelola.

Bentuk-bentuk Sosial Forestry yang akan dikembangkan antara lain agroforestry, Hutan Kemasyarakatan, pengembangan tanaman pangan dibawah tegakan, lebah madu, getah-getahan, dll.

Ini berarti bahwa setiap program pembangunan kehutanan selain diarahkan untuk kelestarian sumberdaya alam, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan harapan dapat meningkatkan "peran serta mereka terhadap pelestarian sumberdaya hutan".

Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (DAFEP) yang mempunyai filosofi bahwa tujuan proyek tersebut adalah untuk memberdayakan petani dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, demokratis, desentralisasi, keterbukaan, akuntabilitas, kemitraan, integrasi, kemandirian dan berwawasan lingkungan.

Dalam menumbuh-kembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif tersebut proyek DAFEP memfasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan yang dikelola oleh petani yang disebut dengan *Farmer Managed Activities (FMA)*.

Menurut Bapak, apa tujuan dari pelaksanaan FMA itu ?

Tujuan dari pelaksanaan FMA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan petani dalam mengidentifikasi potensi yang dimiliki, masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan usahanya dan alternatif-alternatif pemecahannya.
2. Meningkatkan kemampuan petani untuk memilih usaha yang paling menguntungkan, mengidentifikasi kebutuhan informasi, teknologi dan sarana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.



Meningkatkan kemampuan petani melalui pelaksanaan FMA.

3. Meningkatkan keswadayaan, keswadanaan dan kepemimpinan petani dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan dengan memperhatikan kesetaraan gender.
4. Meningkatkan kemampuan petani pemandu dan organisasi petani untuk menjamin keberlanjutan penyuluhan dari, oleh dan untuk petani dalam pengembangan sistem agribisnis yang berwawasan lingkungan.
5. Menciptakan lingkungan yang mendorong lahirnya fasilitasi pembelajaran bagi petani di tingkat desa dimana para petani laki-laki dan perempuan dapat saling membagi pengalaman dan juga untuk mengembangkan kemitraan diantara mereka.
6. Menjadikan desa sebagai simpul berusaha dan belajar sambil bekerja (*learning by doing*), didukung oleh tim penyuluh di kecamatan.

Peranan Komisi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Tingkat Kabupaten menurut Bapak, sampai sekarang ini apakah masih perlu ditingkatkan ?

Selanjutnya melalui forum pertemuan komisi tingkat kabupaten misalnya, tentunya diharapkan menghasilkan kesepakatan untuk diimplementasikan.

Perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil *Mid Term Review* (MTR) oleh Bank Dunia pada bulan Pebruari yang lalu, disimpulkan bahwa peranan komisi penyuluhan dalam mendorong serta mendukung pelaksanaan Proyek DAFEP masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu tujuan forum pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kesepakatan diantara anggota Komisi Penyuluhan be-

rupa dukungan nyata melalui kebijakan Bapak Bupati dan dukungan dari anggota Dewan yang terhormat tentang potensi-potensi yang ada di setiap desa yang telah diidentifikasi oleh FMA melalui PRA yang telah disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan Desa (RKD), serta beberapa hasil pembelajaran yang telah dikuasai teknologinya oleh petani. Namun karena keterbatasan dari Unit Pengelola Kegiatan Gabungan (UPKG), sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, berupa kemitraan, program pembangunan serta akses pasar.

Peran aktif masyarakat mendukung program pembangunan pertanian dan kehutanan adalah titik kunci. Bagaimana menurut pandangan Bapak dalam kaitannya dengan kemandirian masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan program penyuluhan pertanian dan kehutanan ?

Keberhasilan seluruh kebijakan dan program tidak terlepas dari ada tidaknya peran aktif masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan agar memiliki kemauan dan kemampuan untuk secara mandiri meningkatkan kesejahteraan dirinya serta mendukung program pembangunan pertanian dan kehutanan.

Kemandirian sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan dapat diukur dari tingkat kemampuan masyarakat sasaran penyuluhan dalam hal :

- Memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya.
- Memperhitungkan peluang, tantangan yang dihadapi.
- Memilih berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.

- Menyelenggarakan kehidupan yang serasi dengan lingkungannya secara berkesinambungan.

Dengan memiliki berbagai kemampuan tersebut, masyarakat baik secara individu maupun kelompok diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Akhirnya kepada seluruh anggota UPKG seluruh Indonesia/wilayah binaan DAFEP dapat berusaha secara berkelompok memajukan pertanian dan agroforestry di desanya masing-masing serta dapat membantu turut menjaga kelestarian hutan yang berada di sekitar kita. Demikian, selamat dan sukses selalu. (sh)

Memperkuat Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Daerah Kabupaten/Kota melalui **PELAYANAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI PETANI**

Mengapa informasi dan teknologi pertanian diperlukan ?

Kehidupan dan penghidupan manusia harus terus berkembang, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

Kehidupan para keluarga tani yang penghidupannya sangat bergantung dari usaha di bidang pertanian juga harus terus berkembang sesuai dengan perubahan/perkembangan pola bercocok tanam pada pengelolaan usahatani. Sejak mengambil/memburu, ladang berpindah, usaha menetap, ekstensifikasi, intensifikasi dalam rangka usaha peningkatan produktivitas usahatani sampai pada era agribisnis.

Pada Era Agribisnis pengelolaan usahatani harus lebih diarahkan kepada pe-

ingkatan pendapatan keluarganya yang optimal serta berorientasi pada pasar. Perubahan tersebut sudah barang tentu karena terjadinya perubahan perilaku para keluarganya dari cara menangkap/memburu sampai bagaimana menerapkan teknologi yang tepat untuk mencapai produk yang diminta oleh pasar pada tingkat keuntungan yang optimal.

Pada tingkat usahatani yang berorientasi pada pasar, maka para petani harus selalu berubah perilakunya guna penyesuaian terhadap perubahan pola pengelolaan usahatani yang didasarkan kepada perilaku pasar, sumber daya alam dan manusia serta berbagai kemudahan yang tersedia atau memang diadakan oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Untuk itu para keluarganya harus manajemen usahatani secara baik.

Usahatani dilihat dari fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian dan pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan penilaian hasil pada akhir pelaksanaan usaha (musiman/tahunan). Sebagai pengusahatani pada saat akan merencanakan usahatani, para petani memerlukan informasi berupa perilaku pasar yang meliputi jenis komoditas, volume, kualitas, kontinuitas, harga serta tempat penyerahan barang, informasi sumberdaya yang meliputi sumberdaya alam yang tersedia (tanah dan kesediaan air), sumberdaya manusia yang meliputi kesediaan dan ketrampilan tenaga kerja, informasi kemudahan yang meliputi sarana dan prasarana usahatani, permodalan, peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan usahatani, serta informasi lainnya berupa iklim (sinar matahari, curah hujan, angin dan lainnya) serta informasi mengenai perkiraan adanya serangan hama/peyakit.

Berdasarkan berbagai informasi di atas maka dengan naluri yang penuh kepekaan sebagai seorang wirausaha maka petani beserta keluarganya akan menetapkan jenis usahatani apa yang akan diusahakan serta teknologi apa yang harus diterapkan, agar usahatani akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Seorang pengusahatani harus selalu mendapat berbagai informasi pertanian disamping memiliki kemampuan untuk menganalisa serta memilih dari berbagai alternatif suatu pilihan jenis usaha yang paling tepat serta mampu merencanakan teknologi tepat apa yang akan digunakan dalam usahatani.

Pada saat pengorganisasian dan pelaksanaan usaha, seorang petani harus dapat

menyusun jadwal kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan berdasarkan waktu dimana teknologi (bahan, alat serta cara) yang telah direncanakan diterapkan dengan penggunaan biaya secara efisien. Disini seorang pengusahatani dituntut untuk menguasai teknologi (mengetahui, menguasai serta mampu menerapkannya) disamping kemampuan memimpin pengorganisasian pelaksanaannya.

Setelah hasil produksinya dijual, maka seorang pengusahatani harus mampu menilai pelaksanaan usahatani, apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana, dimana terjadi perubahan atau penyesuaian, menganalisa kembali untung ruginya, apakah penilaian untung rugi sesuai dengan analisa usaha pada saat perencanaan, apabila ada penyimpangan dimana dan kenapa. Maka jelas seorang pengusaha harus memiliki kemampuan mengevaluasi perencanaan serta kemampuan menganalisa untung rugi usahanya. Semua ini sangat diperlukan untuk penyusunan rencana usahatani di musim/tahun berikutnya "*agar hari esok lebih baik lagi!*".

Seseorang termasuk petani beserta keluarganya pasti menghendaki penghidupan yang terus meningkat serta kehidupan yang lebih sejahtera dan perubahan itu hanya terjadi apabila yang bersangkutan mau dan mampu melakukannya. Keluargatani dalam usaha memperbaiki dan mengembangkan usahatani sebagai sumber penghidupannya memerlukan : (a) kemampuan untuk melakukan penganalisan situasi diri mereka, baik saat ini maupun disaat mendatang, (b) kemampuan untuk menemukan dan menyadari permasalahan yang timbul dalam melakukan

usahataniya berdasarkan analisa situasi tersebut, (c) kemampuan mengembangkan wawasan terhadap permasalahan yang timbul serta mampu memilih alternatif cara pemecahannya yang terbaik, (d) termotivasinya mereka untuk melaksanakan pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan alternatif pilihannya, (e) dikuasainya ilmu dan teknologi tertentu yang berkaitan dengan cara pemecahan masalah serta segala konsekuensinya sehingga mereka dapat bertindak berdasarkan alternatif yang mungkin dengan resiko yang paling kecil.

Semua kemampuan yang harus dimiliki petani beserta keluarganya dalam berusahatani yang berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan. Dan itu hanya bisa dicapai melalui proses belajar mengajarnya mereka sendiri melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Dan untuk memperkuat itu semua mereka selalu harus mendapat Pelayanan Informasi dan Teknologi Petani secara terus menerus.

Apa peran Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Daerah ?

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah mengakibatkan berubahnya pola hubungan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam berbagai kewenangan. Secara rinci kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, yang salah satu bagian diantaranya memetakan mengenai kewenangan dibidang pertanian yang merupa-

kan salah satu yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk pelayanan minimal. Dalam kaitan itu, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan standarnya sesuai dengan perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1974 yang benuansa sentralistik ke Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih benuansa desentralistik

Sebagai konsekwensi dari perubahan peta kewenangan yang disebutkan di atas, dalam awal pelaksanaan otonomi daerah, telah terjadi penataan kembali struktur birokrasi Departemen Pertanian. Kelembagaan yang mempunyai fungsi penyuluhan beserta aparturnya bersamaan dengan kelembagaan pelayanan dan pengaturan lainnya yang ada di wilayah telah menjadi aset pemerintah Kabupaten/Kota. Hampir semua daerah Kabupaten/Kota memiliki kelembagaan penyuluhan pertanian, walaupun namanya bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya.

Walaupun dilihat dari tingkat eselonnya kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota umumnya rendah (eselon III atau IV), namun dari segi tugas dan fungsi dalam mengemban penyuluhan pertanian sangat besar dengan klien keluarga tani yang mencakup lebih dari 60% penduduknya. Kewenangan dibidang penyuluhan pertanian yang tadinya menjadi urusan Pusat dan Propinsi, dengan ditetapkannya otonomi daerah, kini menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai contoh penyediaan dan pelayanan informasi pertanian yang masa lalu dilakukan oleh Balai Informasi Pertanian Regional/Propinsi kini menjadi tanggung jawab kelembagaan penyuluhan pertanian kabu-

paten/kota. Ini tercermin dari nama sebagian besar kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota **“Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian**.

Informasi diartikan sebagai suatu data atau keterangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam melakukan usahatani, sedang teknologi diartikan sebagai bahan, alat atau cara yang dapat digunakan dalam usahatani. Namun demikian tidak ada suatu batasan yang pasti yang dapat membedakan arti antara informasi dan teknologi. Informasi umpamanya berupa keterangan tentang pasar (jenis produk, volume, kualitas, waktu dan harga untuk suatu produk pertanian tertentu), tentang iklim (curah hujan, angin, sinar matahari dsb). Data tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi para petani untuk memilih alternatif jenis atau kombinasi cabang usahatani yang akan

direncanakan untuk diusahakan. Teknologi merupakan bahan, alat dan atau cara untuk melaksanakan usaha tani sehingga permintaan pasar tentang volume, kualitas serta waktu untuk suatu produk tertentu yang diminta dapat terpenuhi.

Pelayanan Informasi dan Teknologi Petani juga dapat menyediakan informasi hasil produk di daerahnya yang diperlukan oleh pihak pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan dan industri hilir pertanian disamping untuk kepentingan pemerintah sendiri untuk melihat sejauhmana ketersediaan pangan di daerahnya. Informasi tersebut berupa jenis, volume, kualitas, waktu serta kontinuitas produk pertanian yang ada atau tersedia di wilayahnya.

Pelayanan Informasi dan Teknologi Petani oleh kelembagaan penyuluhan pertanian bisa berupa bahan tercetak, terproyeksi maupun Audio-visual. Malah se-



Ragam jenis media



Peta singkap

yogyanya sudah harus mulai dikembangkan melalui internet. Keberhasilan pelayanan informasi dan teknologi kepada para keluarga tani akan sangat tergantung dari penetapan kebutuhan materi informasi dan teknologi serta pengemasan materi tersebut dalam berbagai media yang cocok dilihat dari keadaan keluarganya, waktu dan fasilitas komunikasi yang akan digunakan.

Apabila kelembagaan penyuluhan pertanian yang ada di daerah Kabupaten/Kota mampu menyelenggarakan pelayanan jasa Informasi dan Teknologi Petani secara baik, maka kelembagaan itu akan sangat diharapkan keberadaannya oleh orang-orang yang bergerak dibidang pertanian khususnya para petani beserta keluarganya. Kelembagaan ini akan memberikan pelayanannya kepada paling tidak

60% masyarakat di daerah Kabupaten/Kota-nya sebagaimana diamanatkan oleh konsideran Undang-undang nomor 22 tahun 1999.

Konsep penataan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola Pelayanan Informasi dan Teknologi Petani adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Teknologi.

Konsep dasar pengelolaan yang meliputi penetapan kebutuhan, mengolah, menyimpan serta menyelenggarakan pelayanannya. Dalam penetapan kebutuhan data informasi dan teknologi pertanian ada dua acuan, yaitu informasi dan teknologi yang diperlukan oleh para petani beserta keluarganya yang berkaitan dengan penyelenggaraan usahatani (*felt need*) dan ini harus mengacu pada rencana usahatani, dan yang kedua adalah informasi dan teknologi yang berkaitan dengan potensi wilayah, sehingga apabila petani beserta keluarganya akan mengembangkan usahatani tersebut, kebutuhan informasi dan teknologinya dapat terpenuhi.

Data tentang informasi dan teknologi bisa didapatkan dari berbagai sumber antara lain lembaga penelitian, perpustakaan, hasil pengamatan atau laporan, hasil temuan petani atau pihak lembaga lain baik dalam maupun luar negeri. Data tersebut harus tersimpan rapi agar mudah penyelusurannya apabila diperlukan.

Data informasi dan teknologi yang segera diperlukan oleh para petani beserta keluarganya dalam melangsungkan usahatannya, diolah menjadi media penyuluhan pertanian. Penetapan jenis atau bentuk



Penetapan kebutuhan materi

media akan sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain : peruntukan, keadaan dan kebiasaan klien, kemampuan dan tersedianya biaya untuk memproduksi media yang bersangkutan.

Bagan pengelolaan pelayanan informasi dan teknologi dapat dilihat pada halaman 12.

2. Unit Perpustakaan.

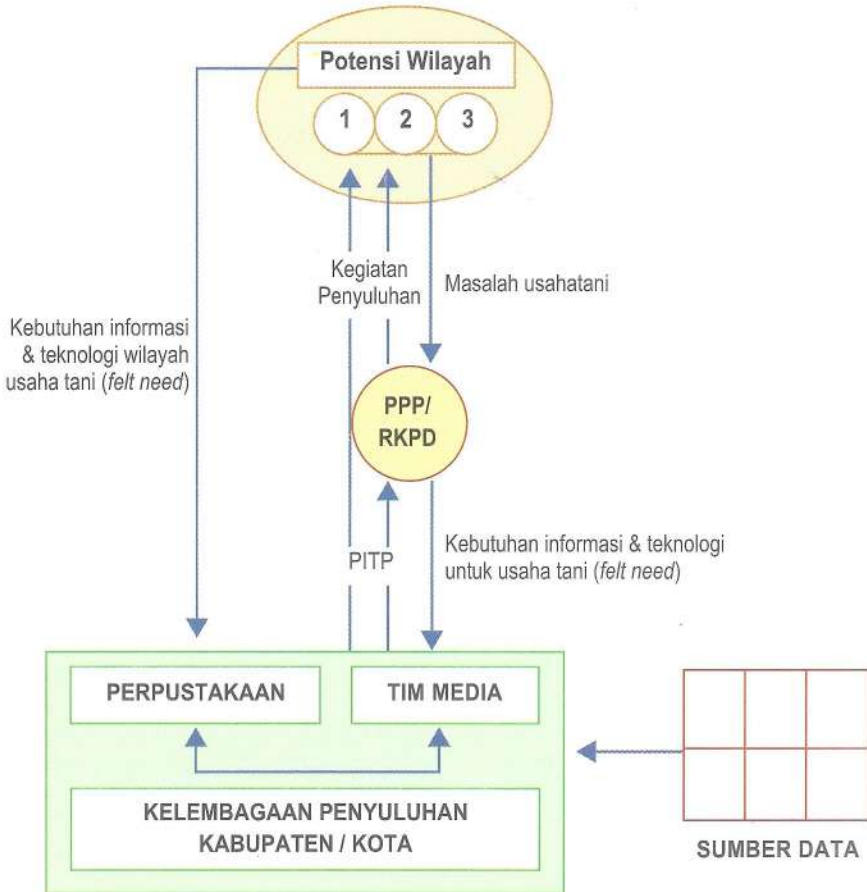
Perpustakaan yang ada sekarang pada BIPP atau KIPP atau unit Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota, harus dikembangkan tidak hanya sebagai perpustakaan yang biasa dalam arti ada koleksi buku dan tempat baca atau tempat peminjaman buku, tapi harus menjadi “ Bank Data Pertanian”. Unit baru ini harus menjadi tem-

pat pengumpulan, pengolahan, penyimpanan serta pengemasan informasi dan teknologi yang suatu waktu diperlukan oleh keluarganya untuk mengembangkan usahatani, sehingga hasil usahanya dapat memenuhi permintaan pasar disamping untuk penyediaan kebutuhan pangan keluarga dan masyarakat di daerahnya.

Bank data pertanian harus dilola oleh tenaga profesional yang :

- a. Mampu menetapkan berbagai kebutuhan teknologi dan informasi berdasarkan kepada kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) keluarganya maupun berdasarkan potensi wilayah kabupaten/Kota dalam pengembangan usahatani yang lebih luas guna memenuhi permintaan pasar (perhatikan bagan

Bagan pengelolaan pelayanan informasi dan teknologi



Keterangan : 1 s.d. 3 = Rencana Usahatani Keluarga (RUK)
 Sumber data = Instansi, Lembaga Penelitian, Perpustakaan, Petani Bahan dari sumber luar negeri dan sebagainya.

pengelolaan dan pelayanan informasi dan teknologi).

- b. Mampu mengumpulkan berbagai bahan dari berbagai sumber informasi/data baik dari dalam negeri maupun luar negeri guna memenuhi kebutuhan tersebut di atas serta mampu mengklasifikasikannya agar memudahkan dalam penyimpanan, penelusuran kembali bila sewaktu-waktu diperlukan.
- c. Mampu mengolah dan menganalisa data untuk bahan informasi seperti antara lain mengolah data curah hujan. Dari data curah hujan tahunan atau bulanan atau harian menjadi data ketersediaan air yang dinyatakan liter perdetik. Ini diperlukan karena setiap tanaman memerlukan air dalam hitungan liter perdetik.
- d. Mampu membuat perkiraan atau ramalan jenis komoditas apa yang bisa diusahakan oleh keluarganya, misalnya dengan melihat ketersediaan air (berasal dari hujan, pengairan atau air tanah), sinar matahari, angin, kemungkinan adanya serangan hama/penyakit, permintaan pasar serta ketersediaan sarana usahatani dan permodalan.
- e. Mampu membuat analisa berbagai hambatan dan prakiraan kegagalan hal hal tersebut pada ponit d) serta usaha usaha penanggulangannya.
- f. Memiliki kemampuan menggunakan komputer (internet/website), karena akhirnya bank data ini harus dilakukan dengan komputerisasi.

3. Kelompok Penyuluh Pertanian.

Dari kelompok penyuluh pertanian yang ada sekarang sebagian dibina dan ditingkatkan kemampuannya menjadi te-

naga-tenaga yang profesional dibidang keinformasian dan dikuatkannya menjadi suatu **Tim Media** yang memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. Mampu menetapkan kebutuhan teknologi dan informasi yang diperlukan oleh keluarganya dalam menyelenggarakan usahatani.
- b. Mampu memilih teknologi dan informasi yang tersedia pada Bank Data sesuai dengan kebutuhan keluarganya dalam pengembangan usahatani berdasarkan Rencana Usahatani Keluarga (RUK).
- c. Mampu memilih dan menetapkan jenis media informasi mana yang akan diproduksi berdasarkan kebutuhan, perilaku dari keluarganya yang memerlukannya serta faktor lainnya (sesuai kaidah pemilihan dan penetapan media yang akan diproduksi).
- d. Mampu membuat design dan prototipe media yang akan diproduksi yang akan disebarakan kepada para petani baik penyebaran secara langsung maupun yang akan digunakan sebagai bahan ajar dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang telah direncanakan melalui RKPd (Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa).
- e. Mampu melakukan pre-test prototipe media tersebut, menyempunakan kembali sesuai hasil pre-test sebelum diproduksi serta pengawasan dalam proses produksi.
- f. Mampu melakukan evaluasi efektivitas bahan informasi yang telah disebarakan sebagai bahan penyempurnaan atau perubahan dalam memproduksi media informasi berikutnya. (md)

DAFE (Decentralized Agricultural and Forestry Extension)

(Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Terpadu)

DAFEP (*Decentralized Agricultural and Forestry Extension Project*) adalah sebuah konsep model desentralisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan secara terpadu yang terstruktur dan terkemas dalam administrasi proyek sesuai dengan sistem administrasi pembangunan Republik Indonesia. Dalam makalah ini, saya ingin membatasi pembahasan saya terhadap DAFEP sebagai sebuah *konsep model desentralisasi penyelenggaraan penyuluhan (Pertanian dan Kehutanan) terpadu*, dan bukan sebagai sebuah *Proyek*. Karena itu, maka saya menulis makalah ini berjudul DAFE.

Ada beberapa alasan mengapa saya memilih judul DAFE antara lain :

1. DAFEP sebagai sebuah Proyek model desentralisasi penyelenggaraan penyuluhan yang meliputi aspek kelembagaan, ketenagaan, sarana/prasarana dan biaya serta tata laksana penyuluhan pertanian dan kehutanan terbangun dari beberapa elemen, antara lain Konsep DAFE itu sendiri, Desain dan Perencanaan Proyek serta Implementasi Manajemen Proyeknya. Karena itu, telaahan terhadap penyelenggaraan DAFEP seyogyanya dapat dilakukan secara paripurna (*komprehensif*) dan tuntas (*holistik*). Telaahan yang
- bersifat parsial menurut hemat kami tidak akan mampu menemukan apa yang menjadi kelebihan/keunggulannya, ataupun kekurangan/kelemahannya sebagai sebuah Proyek model penyelenggaraan penyuluhan.
2. Telaahan terhadap DAFEP seyogyanya dapat dilakukan meliputi telaahan terhadap a) Konsep DAFEP, b) Desain dan Perencanaan Proyek DAFEP, dan c) Implementasinya. Mengingat pelaksanaan DAFEP baru berjalan selama 2 tahun, maka akan sangat sulit untuk melakukan telaahan terhadap hasil (*out-put* maupun *outcomes*-nya).
3. Analisis atau telaahan terhadap Konsep DAFEP setidaknya-tidaknya dapat mencakup telaahan terhadap penerapan azas-azas filosofis, sosiologis, psikologis dan organisatoris yang terkandung di dalam konsep tersebut. Kandungan penerapan azas-azas tersebut akan dapat menunjukkan tingkat feasibilitas, reliabilitas dan akuntabilitas DAFEP. Hal ini menjadi sangat penting karena DAFEP merupakan model program atau proyek di bidang pendidikan masyarakat yang dapat dianalogikan sebagai kurikulum pendidikan masyarakat petani yang berkaitan secara langsung dengan masalah pembangunan moral bangsa.

4. Telaahan terhadap Desain Proyek dititik beratkan untuk menganalisis sejauh mana konsistensi dan kekonsekuenan tahapan perencanaan operasional mengaktualisasikan dan mengimplementasikan konsep DAFEP kedalam desain dan perencanaan proyek. Konsep sebaik apapun apabila pengemasannya kedalam bentuk desain dan perencanaan proyeknya dilakukan secara tidak konsekuen dan tidak konsisten akan mengalami berbagai penyimpangan didalam tahap implementasinya di tingkat lapangan.
5. Telaahan terhadap Implementasi Proyek dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana konsistensi dan kekonsekuenan tahapan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan proyek DAFEP dalam manajemen pelaksanaan operasionalnya. Penyimpangan yang terjadi dalam manajemen pelaksanaan kegiatan operasional proyek tidak serta merta merupakan kesalahan dari konsepnya dan atau desain perencanaan proyeknya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tulisan ini hanya akan membahas DAFEP dari sisi konsep sebuah model desentralisasi penyelenggaraan penyuluhan secara selayang pandang. Harapan saya

semoga pembahasan Konsep DAFE secara selayang pandang ini dapat sedikit membuka cakrawala dan pemahaman kita terhadap DAFE.

Latar Belakang

Berbagai perubahan multi dimensional yang telah dan tengah terjadi, baik secara global, regional, nasional maupun lokal akan serta merta menuntut tindakan antisipasi dan atau adaptasi terhadap perubahan itu. Barang siapa yang tidak melakukan tindakan antisipasi, adaptasi atau penyesuaian terhadap perubahan ini, cepat atau lambat akan tergilas oleh zaman, karena perubahan itu merupakan sebuah *keniscayaan*. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, *perubahan* itu saat ini telah dan tengah terjadi. Tantangan globalisasi multidimensional dibidang pertanian, tuntutan reformasi, desentralisasi, demokratisasi dll., kesemuanya itu merupakan sebuah *keniscayaan* yang memerlukan tindakan antisipasi dan atau adaptasi dalam penyelenggaraan penyuluhan.

DAFE secara konseptual mencoba mencermati perubahan perubahan yang telah, tengah dan akan terjadi di lingkup penyelenggaraan penyuluhan pertanian seperti tertuang dalam tabel berikut.

Produktivitas :

- adalah “keinginan” dan “upaya manusia untuk selalu meningkatkan kesejahteraan hidup dan penghidupannya di segala bidang.
- orang optimis, cenderung mampu melihat “peluang” dalam setiap kesulitan.

Tabel. Perubahan Paradigma Penyuluhan Pertanian

Unsur	Kondisi saat ini	Kondisi yang ingin diwujudkan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> ● Sentralistik. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Desentralistik.
Pendekatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Top-down. ● Farmers-last. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Bottom-up. ● Farmers-first.
Model Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> ● Alih Teknologi. ● Linier. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepemimpinan Petani. ● Interaktif.
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ● Adopsi Teknologi. ● Penyampaian Pesan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan Sumberdaya Manusia. ● Pemberdayaan Petani.
Strategi	<ul style="list-style-type: none"> ● Umum/General. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Spesifik lokasi, sosial, budaya setempat, berorientasi jender.
Sumber Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Pusat-Pusat Penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Petani. ● Swasta. ● Perguruan Tinggi. ● Pusat-Pusat Penelitian.
Peran Penyuluh	<ul style="list-style-type: none"> ● Guru (mengajar). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitator (fasilitasi).
Peran Petani	<ul style="list-style-type: none"> ● Penerima, pengguna informasi dan iptek. ● Obyek Pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kolaboratif aktif. ● Subyek/Pelaku aktif Pembangunan
Pembiayaan (Anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemerintah Pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kemitraan & Cost Sharing : Pemerintah Daerah, Swasta, Petani, LSM, Perusahaan, PT, Subsidi.

Pengertian

DAFE, adalah model penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan terpadu yang berorientasi pada penerapan azas Desentralisasi dan Pemberdayaan Petani.

Desentralisasi dan Pemberdayaan Petani adalah ibarat dua sisi mata uang yang

tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Desentralisasi berkaitan dengan aspek kewenangan dan pemberdayaan berkaitan dengan kekuasaan. Kewenangan dan kekuasaan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan secara berbarengan dan berhasil menjadi milik petani dan kelembagaannya.

1. Desentralisasi

Desentralisasi ialah proses menyerahkan/memberikan/menggulirkan kewenangan

- dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- dari Aparat kepada Masyarakat (petani dan kelembagaannya).

Kewenangan adalah : hak seseorang atau kelompok untuk bertindak (melakukan sesuatu) atau untuk tidak bertindak (tidak melakukan sesuatu). Hak untuk mengambil keputusan sendiri dan hak untuk bertindak sesuai keputusannya.

Pertanyaan :

Sudah sejauh mana kita memberikan kewenangan atau hak kepada petani dan kelembagaannya dalam program pembangunan pertanian?

Sudah sejauh mana penyuluhan pertanian kita membangun kemampuan petani dan kelembagaannya untuk dapat menggunakan kewenangannya (hak untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusannya) dalam pembangunan pertanian ?

Sudah sejauhmana pula pembangunan pertanian berorientasi pada pengembangan dan peningkatan usahatani(agribisnis) para petani yang sesuai dengan penerapan azas desentralisasi?

Desentralisasi Penyuluhan harus mampu membangun pemahaman, kemampuan, kekuatan dan keberanian kepada para petani dan kelembagaannya untuk dapat menggunakan kewenangan yang menjadi miliknya (hak untuk mengambil keputusan dan bertindak) secara bertanggung-jawab dalam pembangunan pertanian.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat (Petani), ialah proses menyerahkan/memberikan/menggulirkan kekuasaan dari aparat kepada masyarakat (petani dan kelembagaannya).

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok (petani dan kelembagaannya) untuk melakukan tindakan agar sesuatu dapat terjadi atau mencegah sesuatu untuk tidak terjadi.

Ada 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu : kekuasaan terhadap peran (*role-power*), kekuasaan terhadap keahlian (*expert-power*) dan kekuasaan terhadap sumberdaya (*resource-power*).

Kekuasaan terhadap Peran (*Role Power*), ialah kemampuan seseorang atau kelompok (petani dan kelembagaannya) untuk mengambil keputusan dan memberlakukan serta menerapkan keputusan itu secara taat azas.

Kemampuan ini secara kognisi perlu didukung oleh tumbuhnya kemampuan menyusun rencana kegiatan dan rencana usahatani serta peraturan-peraturan yang realistik dan rasional. Secara afeksi harus didukung oleh tumbuhnya kesadaran, keberanian, rasa percaya diri, semangat dan etos kerja, serta motivasi dan rasa tanggungjawab sebagai kekuatan intrinsik, agar mampu melaksanakan rencananya serta memberlakukan dan menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan secara taat azas. Secara psikomotorik (keterampilan) harus didukung oleh tumbuhnya kemampuan memimpin, berkomunikasi serta kemampuan bertindak secara efektif dan efisien.

Kemampuan pada ketiga ranah tersebut di atas (afeksi, kognisi dan psikho-

motorik) harus dilandasi oleh tumbuhnya kemampuan pada aspek konasi yaitu kemampuan untuk memiliki dan memelihara tumbuh-kembangnya keinginan, harapan, dan cita-cita pada diri petani sebagai subjek, pelaku utama pembangunan pertanian.

Kekuasaan terhadap keakhlian (*Expert power*) adalah kemampuan seseorang (petani dan kelembagaannya) untuk bertindak yang didasari oleh penguasaan terhadap iptek dan informasi, sehingga menjadi kecakapan dan keakhlian khusus. Dalam aspek manajemen dan kepemimpinan, kemampuan bertindak yang didasari penguasaan iptek dan informasi akan membangun seseorang atau sekelompok orang memiliki kewibawaan, sehingga berkemampuan dan sangat efektif untuk

mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kekuasaan keakhlian, atau membangun kemampuan akses dan kontrol petani dan kelembagaannya terhadap iptek dan informasi ini hanya dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang terus menerus atau berkelanjutan serta terjalinnya jejaring informasi iptek yang berfungsi secara efektif dan dinamis.

Kekuasaan terhadap Sumberdaya (*Resource Power*) adalah kemampuan dan kekuatan seseorang atau kelompok (petani dan kelembagaannya) untuk menguasai dan memanfaatkan (kontrol dan akses) terhadap sumberdaya (sumberdaya tanah, air, modal, sarana produksi, alsintan, teknologi, informasi, pasar, dll).



Kemampuan seseorang atau kelompok dalam mengelola sumberdaya teknologi.



Kemampuan seseorang atau kelompok dalam mengelola sumberdaya sarana produksi

Kekuasaan atau kemampuan dan kekuatan petani dan kelembagaannya dalam penguasaan sumberdaya ini merupakan hal pokok dan penting dalam melakukan peranannya sebagai manajer usahatani-nya. Tanpa kemampuan dan kekuatan penguasaan sumberdaya ini, tak mungkin pemberdayaan akan dapat diwujudkan secara optimal.

Untuk membangun kemampuan dan kekuatan petani dan kelembagaannya dalam penguasaan sumberdaya diperlukan kemampuan manajerial dan kemampuan membangun jejaring kerjasama baik intra kelompok maupun antar kelompok, agar tumbuh menjadi kekuatan. Penguasaan sumberdaya tidak mungkin terwujud tanpa disertai tumbuhnya kekuatan petani

dan kelembagaannya. Kekuatan petani dan kelembagaannya merupakan prasyarat utama untuk dapat meningkatkan posisi tawar dalam bermitra dengan pihak-pihak lain dalam kesetaraan.

Ketiga jenis kekuasaan tersebut di atas harus mampu dimiliki petani dan kelembagaannya agar mereka mampu menjadi petani tangguh, dan berdayasaing sehingga mampu bermitra sejajar dengan pelaku bisnis lainnya.

Penerapan azas desentralisasi dan pemberdayaan dalam pendidikan (belajar mengajar) masyarakat petani pada hakekatnya adalah proses pendidikan masyarakat yang berorientasi pada teori pendidikan "pembebasan individu" untuk membangun sosok manusia petani yang ber-

kepribadian utuh, bebas, merdeka, dinamis, kreatif dan demokratis yang sangat diperlukan di era globalisasi multi-dimensional yang sangat kompetitif.

Secara teoritis, sistem pendidikan di atas merupakan kutub yang berbeda dan bertolak belakang dengan sistem pendidikan masyarakat yang selama ini diterapkan dalam pendidikan masyarakat kita yang menganut teori pendidikan kewarganegaraan. Sistem pendidikan kewarganegaraan adalah sistem pendidikan yang berorientasi pada upaya membangun individu menjadi warga negara yang baik, membangun individu yang taat, patuh, guyub, dan berdedikasi.

Kita tidak bermaksud untuk mempertentangkan kedua teori pendidikan di atas, namun dengan memahami perbedaan dari kedua teori di atas akan dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwa

konsep DAFE menuntut adanya suatu perubahan yang sangat mendasar dan esensial dalam sistem penyelenggaraan penyuluhan atau sistem pendidikan petani dan keluarganya. Perubahan mendasar itu mencakup aspek falsafah penyuluhan (idealisme, rasionalisme, pragmatisme dan eksistensialisme penyuluhan), pengertian penyuluhan, tujuan, sasaran, pendekatan, metodologi, materi dan metode penyuluhan serta penyelenggaraan penyuluhan (kelembagaan, ketenagaan, sarana/prasarana/biaya dan tata laksana penyuluhan).

3. Penyuluhan Partisipatif

DAFE sering juga disebut sebagai Penyuluhan Partisipatif atau Penyuluhan Kemitraan. Penyuluhan Partisipatif diartikan sebagai penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan yang dikelola oleh para petani dan atau oleh kelem-



Penyelenggaraan penyuluhan yang dikelola oleh para petani atau kelembagaan tani.

bagaan petani. Aparat bertindak sebagai mitra dan fasilitator yang merespons secara positif terhadap penyelenggaraan penyuluhan yang dikelola petani.

Kondisi ini merupakan perubahan yang ingin diwujudkan oleh DAFE. Sudah barang tentu kondisi ini tidak mungkin akan dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat, sebab sebagaimana telah diuraikan di atas perubahan ini merupakan perubahan yang sangat mendasar karena akan sangat dipengaruhi oleh aspek perubahan filosofis, sosiologis, psikologis, politis, dan organisatoris dalam tatanan dan struktur masyarakat. Karenanya perubahan ke arah itu akan terjadi secara beragam dan bertahap sesuai dengan perkembangan daerah atau wilayah yang bersangkutan.

Keragaman dan tahapan perubahan itu dapat dibedakan dengan melihat dari ciri-ciri atau tipologi partisipasinya.

Pengalaman di lapangan menunjukkan, terdapat 7 (tujuh) jenis Partisipasi Masyarakat yang dibedakan berdasarkan derajat partisipasinya, yaitu :

1. Partisipasi Pasif (Partisipasi Manipulatif).
2. Partisipasi melalui Pemberian Informasi.
3. Partisipasi melalui Konsultasi.
4. Partisipasi untuk keuntungan/manfaat material.
5. Partisipasi Fungsional.
6. Partisipasi Interaktif.
7. Masyarakat Mandiri.

Partisipasi pasif (partisipasi manipulatif) :

- Masyarakat diberi informasi tentang apa yang sedang terjadi.

- Aparat Pembangunan memberikan Informasi Satu Sisi (*one sided information*)*, tanpa memperhatikan respons masyarakat.
- Pertukaran informasi dengan para ahli/profesional di luar khalayak sangat terbatas.

(* *One Sided Information* dapat diartikan sebagai *informasi satu arah*, atau pemberian *informasi satu sisi*, yaitu pemberian informasi yang sesuai dengan kepentingan pemberi informasi, misalnya informasi yang diberikan hanya mengenai aspek keuntungannya saja, tapi informasi tentang dampak-dampak negatifnya tidak diinformasikan (disembunyikan).

Partisipasi melalui pemberian informasi :

- Masyarakat hanya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang luar (Peneliti, Perencana, dll.)
- Masyarakat tidak memperoleh peluang untuk terlibat dan mempengaruhi proses kegiatan (penelitian, perencanaan dll.)
- Ketepatan hasil penelitian / perencanaan tidak didiskusikan dengan masyarakat.

Partisipasi melalui konsultasi :

- Masyarakat berpartisipasi melalui konsultasi.
- Orang luar (Peneliti, Perencana) mendengarkan pendapat khalayak, kemudian mereka menganalisa, merumuskan pemecahan masalahnya, serta memodifikasi opini masyarakat.
- Masyarakat tidak memiliki peluang untuk turut serta mengambil keputusan.
- Kehadiran Kelompok Profesional tidak diperlukan / tidak diwajibkan.
- Opini masyarakat harus ditindaklanjuti.

Partisipasi untuk mendapat keuntungan material :

- Masyarakat sebagai penyedia sumberdaya misalnya sebagai tenaga kerja yang mendapat upah.
- Masyarakat tidak terlibat dalam proses belajar pada Penelitian/Perencanaan dll.
- Masyarakat tidak memiliki kontribusi untuk keberlanjutan kegiatan.

Partisipasi fungsional :

- Masyarakat menetapkan kelompok untuk mencapai tujuan.
- Kelompok ditetapkan setelah keputusan utama / penting disepakati.
- Pada tahap awal, masyarakat masih ada ketergantungan kepada pihak luar, tapi di kemudian hari mereka akan dapat mandiri untuk menolong dirinya sendiri.

Partisipasi interaktif :

- Masyarakat memainkan peranannya dalam analisis bersama untuk menyusun rencana kegiatan dan untuk memperkuat atau memantapkan kelembagaannya.
- Ini dimaksudkan untuk menerapkan metode multi disiplin dalam menemukan berbagai perspektif dalam pembelajaran masyarakat yang terstruktur dan sistematis.
- Masyarakat melakukan kontrol terhadap keputusan-keputusannya, dan mereka berbagi dan terlibat dalam semua kegiatan.

Masyarakat mandiri :

- Masyarakat mengambil inisiatif secara bebas untuk melakukan perubahan sistem atau norma-norma mereka.

- Masyarakat mengembangkan kontak/ hubungan dengan kelembagaan lainnya untuk memperoleh dukungan teknis dan sumberdaya lainnya yang mereka butuhkan.
- Masyarakat melakukan kontrol terhadap penggunaan sumberdaya yang tersedia.

Falsafah dan tujuan DAFE

1. Falsafah

Idealisme; secara tersurat dan tersirat sangat jelas bahwa DAFE bercita-cita untuk memantapkan eksistensi dan kemandirian petani melalui pendekatan pembebasan petani. Hal ini tercermin dari konsep DAFE yang berorientasi pada *Farmers First and Farmers Last* dan proses pengambilan keputusan oleh petani sendiri. Petani menjadi individu dan subjek yang bebas, merdeka, kreatif, berkemampuan, berdayasaing dan mandiri. Itulah cita-cita yang disandang dalam konsep DAFE.

Realisme; secara realisme, konsep ini tergolong sangat realistis dan berani yakni secara konsekuen DAFE ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya di atas dengan menerapkan azas desentralisasi dan pemberdayaan petani. Desentralisasi dan pemberdayaan yang dianut oleh konsep DAFE bukan hanya sekedar mengulirkan kewenangan dan kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah semata, namun menganut pengertian yang lebih hakiki lagi, yakni mengulirkan kewenangan dan kekuasaan dari aparat kepada masyarakat cq petani dan kelembagaannya. Dalam konsep DAFE hal ini tercermin dengan didudukkannya petani sebagai pengelola program penyulu-

luhan di wilayahnya dan motto : *Farmers first and farmers last*.

Konsep ini lahir dengan momentum yang tepat, yakni ditengah euphoria reformasi dan desentralisasi. Namun demikian ketepatan dalam momentum waktu, tidak berarti akan berkurangnya masalah, tantangan, hambatan dan kendala dalam proses perwujudannya. Seperti diketahui, sejarah pendidikan bangsa sejak jaman penjajahan dulu dan diteruskan selama lima dasa warsa terakhir ini, pendidikan masyarakat kita menganut paham dan pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang sangat terbuka dan sangat rentan terhadap intrik-intrik politik dari para penguasa pada jamannya. Ketaatan, kepatuhan, sentralistik, keseragaman, dan kegyuban menjadi pilar-pilar utama dalam pendidikan masyarakat dan sistem kemasyarakatan kita selama ini. Inilah tantangan yang tidak ringan yang akan dihadapi dalam penerapan konsep DAFE.

Pragmatisme; DAFE bercita-cita untuk mendudukkan petani dan kelembagaannya sebagai pengelola penyuluhan yang notabene mendudukkan petani sebagai subjek pelaku utama pembangunan pertanian di wilayahnya. Pada tatanan ini telaahan kita diarahkan pada bagaimana pragmatisme ini dapat diwujudkan dalam tatanan tindakan nyata berupa kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan (PRA, RUK, RKK, RKD, RKPD, FMA) yang terukur, runut dan taat azas serta sesuai dengan kebutuhan dan situasinya sehingga akan dapat diperoleh kemanfaatannya secara optimal. *Keterukuran*, adalah tentang keterjaminan terhadap pencapaian tujuan. Apakah penegakan falsafah di atas dapat tercapai melalui kegiatan-kegiatan

yang telah ditetapkan. *Kerunutan*, menyangkut keteraturan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tahapan kebutuhan dan situasinya. *Ketaat azasan*, akan menyangkut konsistensi dan kekonsekuenan penerapan falsafah serta azas-azas lainnya seperti azas sosiologis, psikologis, politis dan organisatoris dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatannya.

2. Tujuan

Jangka panjang, DAFE bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan keluarga petani melalui pengembangan usahatani/usaha agribisnis keluarannya dengan cara membangun kemampuan menyusun rencana usahatani yang realistik dan rasional, mengembangkan kualitas jejaring kerjasama, kemitraan usaha dan pembelajaran dalam situasi nyata yang dikelola oleh para petani sendiri secara berkelanjutan.

Jangka menengah, DAFE bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas kelembagaan dan ketenagaan petani dan penyuluh (*capacity building*) selaku pelaku penyelenggara penyuluhan pertanian di wilayahnya melalui panatalaksanaan penyelenggaraan penyuluhan yang terdesentralisasi.

Jangka pendek, DAFE bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi petani (laki-perempuan-pemuda) pada proses belajar mengajar petani dalam penyuluhan yang dikelola petani melalui penguatan kelembagaan petani dan penyuluh serta meningkatkan kemampuan fasilitasi pendukungannya melalui kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang terkait.

Metodologi / instrumen DAFE

Yang dimaksud dengan metodologi atau instrumen DAFE disini adalah tahapan proses yang dikemas dalam konsep DAFE untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Metodologi / instrumen di Desa

1. PRA (*Participatory Rural Appraisal*) atau Pengkajian Desa secara Partisipatif.
2. RUK (Rencana Usaha Keluarga) yang diawali dengan penyusunan Profil Keluarga serta pemilihan jenis usaha potensial.
3. RKK (Rencana Kegiatan Kelompok).
4. RKD (Rencana Kegiatan Desa).
5. RKP (Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa).
6. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian yang dikelola oleh petani.
7. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Partisipatif.

1. PRA (*Participatory Rural Appraisal*)

Pengertian PRA dalam revitalisasi penyuluhan pertanian adalah suatu proses pembelajaran petani untuk dapat memahami potensi dan masalah di wilayah desanya melalui kegiatan pengamatan dan pengkajian yang dilakukan oleh masyarakat petani sendiri. Aparat (petugas dan penyuluh) serta Pihak Luar berperan sebagai fasilitator. Dalam konteks pembelajaran masyarakat (baca : penyuluhan pertanian), PRA dimaksudkan sebagai sarana dan metode belajar petani untuk membangun kemampuan analisis petani terhadap

potensi wilayah dan masalahnya sendiri, sehingga mereka berkemampuan untuk berpikir, merencanakan dan bertindak secara realistik dan rasional.

Dengan pengertian di atas PRA bagi petani juga merupakan metode pemberdayaan untuk membangun, menumbuhkembangkan kemampuan/kekuasaan petani terhadap peranannya, kekuasaan terhadap keahliannya dan kekuasaan terhadap sumberdaya.

2. RUK (Rencana Usaha Keluarga)

Instrumen RUK dimaksudkan sebagai sarana dan metode belajar petani dan keluarganya untuk membangun perilaku berencana dan kemampuan menyusun rencana usaha tani keluarganya secara realistik, rasional dan berkelanjutan. Penyusunan RUK secara partisipatif di tingkat keluarga petani diawali dengan tahapan menyusun Profil Keluarga. Hal ini dimaksudkan agar petani dan keluarganya dapat melihat, mengkaji dan menganalisis potensi dan masalah keluarga yang berkaitan dengan upaya pengembangan usahatani mereka. Pembelajaran untuk memilih jenis usaha keluarga dilakukan melalui proses identifikasi dan analisis usaha-usaha potensial berdasarkan hasil analisis Profil Keluarga dan hasil PRA Desa.

Revitalisasi penyuluhan pertanian di tingkat keluarga petani diawali dengan upaya untuk mengubah orientasi usaha keluarga petani ke arah dan wawasan bisnis yang lebih modern sejak dari tahapan memilih dan merencanakan pengembangan jenis usaha keluarga secara realistik, rasional dan partisipatif.

3. RKK (Rencana Kegiatan Kelompok)

Instrumen RKK dipakai sebagai sarana dan metode belajar petani dalam mengembangkan kemampuan berorganisasi dan kerjasama antar individu petani dalam tatanan komunitas terkecil (kelompok) terutama dalam mengembangkan kegiatan bersama di kelompoknya untuk mendukung pengembangan usahatani keluarga para anggotanya agar lebih ekonomis, efektif dan efisien.

Instrumen RKK juga dimaksudkan sebagai sarana dan metode belajar petani dalam meningkatkan kemampuan berkomitmen, yakni belajar mengembangkan rencana kegiatan bersama, merumuskan pengaturan peran, aturan main/aturan kerjasama, melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan mereka secara taat azas, dan agar petani mampu melakukan monitoring dan evaluasi secara terbuka dan partisipatif.

4. RKD (Rencana Kegiatan Desa)

Instrumen RKD merupakan sarana dan metode belajar masyarakat petani agar mereka berkemampuan dalam berorganisasi dan membangun kerjasama yang lebih luas melalui pengembangan kegiatan bersama dalam tatanan jejaring kerjasama antar kelompok dan jejaring kemitraan usaha dengan pihak-pihak lainnya dalam satuan wilayah Desa. RKD juga merupakan sarana kerjasama petani untuk dapat memecahkan masalah usahatani yang tidak dapat dipecahkan di tingkat kelompok. Melalui mekanisme penyusunan RKD secara afektif sekaligus petani belajar membangun kesadaran akan pentingnya membangun jejaring kerjasa-

ma antar kelompok petani untuk membangun kekuatan dan meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam bermitra-usaha dan atau dalam penyelesaian konflik/sengketa dengan pihak lain.

5. RKPd (Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa)

RKPd pada hakekatnya merupakan instrumen pembelajaran petani untuk mampu merencanakan dan merumuskan kegiatan belajarnya berdasarkan kebutuhan mereka sendiri. RKPd yang disusun oleh para petani sendiri pada dasarnya merupakan langkah awal untuk membangun masyarakat petani menjadi masyarakat pembelajar (*learning society*) yang selalu dinamis dan pro-aktif untuk mencerdaskan dirinya sendiri.

RKPd juga merupakan proses pembelajaran petani untuk mandiri dan untuk menghilangkan ketergantungan mereka kepada pihak lain dalam membangun dan memiliki kekuasaan terhadap keahlian. RKPd merupakan instrumen revitalisasi penyuluhan pertanian di tingkat petani untuk mengembangkan pola pembelajaran interaktif dan mengeliminasi kelemahan atau dampak negatif pola pendekatan linier dalam penyuluhan pertanian yang mendudukan petani hanya sebagai sasaran ahir (*farmers-last*) atau hanya sebagai pengguna teknologi semata.

6. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Desa yang dikelola petani

Perubahan yang paling mendasar dalam instrumen revitalisasi penyuluhan pertanian sekarang ini ialah Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Desa yang dikelola

Petani. Petani dan kelembagaannya berperan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan kegiatan penyuluhan pertanian di desanya. Penyuluh dan aparat petugas lainnya berfungsi dan berperan sebagai fasilitator.

Instrumen ini dikembangkan sebagai konsekuensi logis dari diterapkannya prinsip-prinsip pembelajaran interaktif yang dikembangkan dalam revitalisasi penyuluhan pertanian yakni prinsip-prinsip : *discovery learning/ inovative learning, learning by doing, problem solving*, belajar berdasarkan pengalaman, belajar dalam situasi nyata, dll.

Berbagai metode penyuluhan dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan RKPD yang disusun oleh para petani. Misalnya, studi banding, magang, sekolah lapangan, kursus tani, demonstrasi, studi petani, dll. sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Pelaksanaan ini harus mendapat respons positif dari BPP dan FET (*Field Extension Team*/Kelompok Penyuluh Kecamatan) berupa dukungan fasilitasi pembelajaran.

7. **Monitoring - Evaluasi Partisipatif**

Monev Partisipatif merupakan instrumen revitalisasi penyuluhan pertanian untuk membangun perilaku manajemen terbuka dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Instrumen ini merupakan sarana vital dalam menegakkan responsibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian merupakan kegiatan investasi sumberdaya manusia yang hasilnya memerlukan waktu yang

cukup panjang. Dengan demikian Monev Partisipatif akan menjadi sarana penting sebagai sarana monitoring dan evaluasi proses.

Metodologi/instrumen di Kecamatan (BPP)

1. FET (*Field Extension Team*)/Kelompok Penyuluh Kecamatan(BPP).
2. RKPK (Rencana Kegiatan Penyuluhan Kecamatan) / Programa Penyuluhan

1. **FET**

Adalah Kelompok/Tim Penyuluh Kecamatan yang terdiri dari penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, Petani Pemandu, LSM dll. Dan berfungsi untuk memberikan dukungan fasilitasi proses belajar-mengajar yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dikelola petani di tingkat desa.

2. **RKPK**

RKPK atau Programa Penyuluhan Pertanian BPP sebenarnya merupakan aspek perencanaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan dalam mekanisme kerja penyuluhan pertanian yang berlaku selama ini. Namun demikian, dalam revitalisasi penyuluhan pertanian sekarang ini, RKPK atau Programa Penyuluhan Pertanian harus dilengkapi dengan rencana untuk mengakomodasikan dan memberikan dukungan fasilitasi terhadap RKPD yang telah disusun oleh para petani di tingkat Desa.

3. **BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)**

BPP merupakan unit penyelenggara penyuluhan di tingkat kecamatan, sebagai

home base dari tim/kelompok penyuluh kecamatan (FET) yang berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi proses pelaksanaan penyuluhan di desa-desanya.

Dalam penerapannya, seluruh rangkaian instrumen tersebut harus dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, karena sebagai sebuah proses pembelajaran diperlukan adanya pengulangan untuk dapat menjadi kemampuan dan perilaku. Sebagai sebuah proses pembelajaran masyarakat, maka strategi penerapan seluruh rangkaian proses itu harus bergulir menjadi sebuah gerakan masyarakat.

Gerakan Masyarakat adalah Program Pembangunan yang harus disertai dengan tumbuhnya Dinamika Emosional Masyarakatnya. Dinamika emosional adalah proses peningkatan kemampuan emosional (*afeksi*) seseorang. Tingkat kemampuan emosional seseorang berjalan secara bertahap seiring dengan proses belajar yang dilakukannya. Kemampuan emosional seseorang akan tampil dalam bentuk sikap yang bersangkutan terhadap ide/gagasan/konsep/nilai-nilai baru yang diterimanya.

Dalam hal membangun sebuah Gerakan masyarakat, maka kemampuan emosional yang diharapkan adalah berupa sikap positif masyarakat dalam merespons kehadiran program/upaya pembaharuan di lingkungannya. Kemampuan emosional yang diharapkan antara lain tumbuhnya :

- Respons untuk sadar dan menerima ide, gagasan, konsep, nilai-nilai baru dan atau upaya pembaharuan.
- Partisipasi terhadap upaya pembaharuan.

- Integrasi terhadap upaya pembaharuan.
- Pembentukan nilai-nilai pembaharuan.
- Kecintaan terhadap upaya pembaharuan.
- Semangat, etos kerja dan daya juang terhadap upaya pembaharuan.
- Tanggungjawab terhadap upaya pembaharuan.

Proses peningkatan kemampuan emosional dapat juga menghasilkan respons berupa sikap yang negative seperti sikap menolak/penolakan, perlawanan pasif, perlawanan aktif (agresi, menyerang), perlawanan terselubung (sabotase) atau dalam bentuk sikap fatalis, acuh tak acuh, masa bodoh, atau dalam bentuk kepura-puraan.

Semua itu akan sangat bergantung kepada kesempatan belajar dan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan masyarakat itu. Untuk menghasilkan respons yang positif, proses belajar masyarakat harus dilakukan secara komprehensif mencakup ranah-ranah kognitif, afektif, psikomotor, konatif dan spiritual secara seimbang dan serasi. Selama ini, proses belajar masyarakat cenderung ditekankan kepada aspek-aspek keterampilan (psikomotorik) dan kognisi yang dangkal. Aspek afeksi yang menyangkut kemampuan emosional dan aspek konasi yang menyangkut pengembangan aspirasi, keinginan, harapan dan cita-cita masyarakat serta aspek spiritual seringkali terabaikan. Itu sebabnya masyarakat kita cenderung menjadi masyarakat yang pasif, tidak mandiri, mudah menyerah, lemah karsa, dan tidak memiliki daya juang yang kuat karena kehilangan/ketiadaan prakarsa. (zz)

DAFEP DI DESA SELOPROJO

Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Desa Seloprojo terletak lebih-kurang sepuluh kilometer dari kota kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Seluruh wilayah kecamatan yang terletak di bagian utara kabupaten ini adalah dataran tinggi, berkisar antara 800 sampai 1.500 meter diatas permukaan laut/dpl. Seloprojo sendiri terletak di ketinggian antara 800 sampai 1.200 meter dpl. Desa ini dapat dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat, dan jalan masuk menuju desa adalah jalan aspal.

Secara geografis, Seloprojo yang memiliki empat dusun, dapat dibagi dua, yaitu dusun-dusun yang terletak di bagian atas dan dusun-dusun yang terletak di bagian bawah. Dua dusun yang terletak di bagian atas adalah Seloprojo dan Pranten, dan dua dusun di bagian bawah masing-masing Ngaglik dan Pernulu.

Meskipun Seloprojo merupakan bagian dari kecamatan Ngablak, akan tetapi orientasi penduduk desa ini dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi lanjutan ke luar kecamatan, bukanlah ke kota kecamatan Ngablak, melainkan lebih dipusatkan ke sebuah kota kecamatan lain yang lebih ramai dan lebih dekat, yakni sekitar delapan kilometer dari desa, yaitu Grabag. Dari kota kecamatan yang terletak sekitar 20 km dari Magelang ini, tersedia kendaraan umum antara lain ke Magelang, Ambarawa, Kopeng, dan Salatiga pulang-pergi.

Luas Seloprojo lebih-kurang 160 ha, terdiri atas pekarangan dan bangunan 12 ha, tegalan 118 ha, sawah 23 ha, kuburan, jalan dan lain-lain 7 ha. Di sebelah utara desa terdapat lahan kehutanan seluas 69 ha yang ditanami pohon pinus.

Tanaman utama di Seloprojo adalah berbagai jenis sayuran, termasuk kubis, sawi, bawang daun, sledri, wortel, cabe dan tomat. Selain jenis-jenis sayuran tersebut, petani juga mengusahakan padi, jagung, tembakau, ketela pohon dan kimpul (sejenis umbi-umbian). Penanaman padi dilaksanakan di sawah, yang terdapat di tiga dari empat dusun yang ada. Dusun Pranten, yang letaknya paling tinggi, tidak memiliki sawah. Perlu dikemukakan bahwa di Seloprojo, seorang petani yang memiliki sawah pasti memiliki juga tegalan, sedangkan yang memiliki tegalan belum tentu memiliki juga sawah.

Mayoritas petani Seloprojo, yakni sekitar 70%, memiliki lahan seluas 3.000 *kowak* (0,12 ha). Sekitar 15% memiliki kurang dari 3.000 *kowak*, 10% memiliki lebih dari 3.000 sampai 4.000 *kowak* (0,16 ha) sedangkan sisanya (5%) memiliki lebih dari 4.000 *kowak*.

Petani tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panennya. Mereka cukup menunggu di rumah, bakul akan datang untuk membeli. Kemungkinan lain adalah membawanya pagi-pagi sekali (jam empat sampai jam lima) ke pinggir jalan raya Grabag-Kopeng. Di sana sudah menunggu para bakul yang selanjutnya

membawa sayuran dagangannya ke pasar-pasar kecamatan.

Selain bercocok tanam, petani-petani Seloprojo juga memelihara sapi. Setiap keluarga memelihara setidaknya-tidaknya dua ekor sapi. Jumlah keluarga yang memiliki sapi hanya sekitar 25% dari keluarga yang ada di Seloprojo, sedangkan sisanya adalah *penggaduh* (bagi hasil). Untuk pakan ternaknya, petani menanam rumput gajah di lahan Perhutani, di bawah pohon pinus. Lahan tersebut sudah dipetak-petak, dan setiap petak sudah jelas siapa yang menjadi "pemiliknya", dalam arti hak untuk menanam rumput di petak yang bersangkutan. Baik Perhutani maupun petani memperoleh keuntungan dari kolaborasi ini : keamanan pohon pinus terjamin, petani memperoleh lahan untuk menanam rumput.

Pelaksanaan DAFEP

Pelaksanaan DAFEP di Seloprojo pada dasarnya mengikuti pentahapan yang telah digariskan sejak awal, dimulai dari sosialisasi, revitalisasi kelompok, pembentukan UPKG, perencanaan FMA mulai dari PRA sampai proposal, hingga ke pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagai realisasi dari proposal.

Dalam hal sosialisasi, cara yang ditempuh adalah menggunakan praktek dan kelembagaan yang telah berlaku dan dikembangkan sejak lama seperti dikemukakan di atas : kepala desa menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh semua anggota pemerintah desa, pengurus RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat, dan wakil-wakil pemuda. Selanjutnya Pengurus RT/RW melakukan sosialisasi terha-

dap warganya, baik pada kesempatan-kesempatan formal maupun informal.

Revitalisasi kelompok diawali dengan pertemuan tingkat desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, Pengurus RT/RW, dan sejumlah warga termasuk para pemuda. Pada pertemuan itu dibahas tentang maksud dan tujuan revitalisasi kelompok dalam rangka pelaksanaan DAFEP. Rapat menyepakati, antara lain, diselenggarakannya pertemuan tingkat dusun dalam rangka revitalisasi kelompok tersebut.

Pengurus UPKG dibentuk, juga melalui suatu pertemuan tingkat desa yang diprakarsai oleh pemerintah desa. Ketua, sekretaris dan bendahara UPKG diangkat melalui pemungutan suara. Terpilih sebagai ketua adalah seorang tokoh pemuda Seloprojo. Tokoh yang berusia awal tiga puluhan dan masih bujangan ini, mengerjakan lahan warisan orang tuanya. Ia lulusan Sekolah Pendidikan Guru/SPG, dan sekarang melanjutkan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi swasta di Ambarawa. Untuk itu dua hari dalam seminggu ia tinggal di kota tersebut.

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran FMA di Seloprojo diselenggarakan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Mei 2003. Berikut ini disajikan uraian ringkas tentang pelaksanaan dari masing-masing kegiatan pembelajaran FMA tersebut.

Sekolah lapang sapi potong diikuti oleh 25 orang, berasal dari keempat dusun Seloprojo. Setiap bulan diadakan pertemuan, dibimbing oleh seorang fasilitator dari BIPPK. Termasuk dalam kegiatan sekolah lapang ini adalah pemeliharaan

dua ekor sapi dari jenis yang berbeda untuk dibandingkan, masing-masing sapi lokal dan sapi *lemosin*. Pembelajaran tentang pembuatan dan pemberian pakan ternak, cara membuat pakan ternak yang tahan lama, kandang yang memenuhi syarat, memilih bibit ternak yang baik, juga diselenggarakan dan dikaitkan dengan pemeliharaan kedua ekor sapi tersebut di atas.

Pelatihan pembuatan pestisida alami diikuti oleh 25 orang, juga berasal dari keempat dusun Seloprojo. Pestisida alami dibuat dari dedaunan yang terdapat di desa : *mind*i, *mojo*, *suren*, *maringgo*, dan *jen*nu. Dedaunan ini ditumbuk sampai halus, kemudian direndam selama dua malam, disaring, dan siap untuk disemprotkan.

Pelatihan budidaya cabe dilaksanakan selama tiga hari, termasuk praktek lapang. Pesertanya berjumlah 30 orang, termasuk mereka yang menerima Taskin dalam budidaya cabe. Fasilitatornya berasal dari Bantul, yaitu petugas perusahaan pemasok bibit cabe untuk proyek Taskin. Pelatihan ini mencakup pengolahan lahan, pemilihan bibit, pembuatan pesemaian, dan pemeliharaan, termasuk pemberantasan hama. Cara pemakaian mulsa, yang belum dikenal petani, dan pembuatan pupuk (komposisinya), juga dilatihkan.

Pelatihan budidaya bawang daun dilaksanakan dua kali, setiap kali berlangsung selama tiga hari, termasuk kegiatan di lapangan. Pesertanya 50 orang, kebanyakan adalah peserta Taskin bawang daun. Fasilitator di datangkan dari Kecamatan Pakis, Magelang. Dalam pelatihan ini fasilitator memberikan penjelasan, antara lain, tentang cara-cara budidaya

bawang daun, termasuk pemilihan bibit, pemupukan serta pemberantasan hama.

Pelatihan pembenihan tanaman keras diselenggarakan selama tiga hari melalui kerja sama dengan Perhutani. Seloprojo memperoleh bantuan dana sebesar Rp.15 juta untuk prasarana pembenihan dan benih (termasuk suren, mindi, dan apokat). Peserta pelatihan berjumlah 25 orang, sedangkan pelatihnya adalah seorang ahli pembenihan dari Dinas Kehutanan Magelang. Pelatihan mencakup pembuatan pupuk bokashi, pembuatan pot, cara dan frekuensi penyiraman, *penyapihan*, dan seterusnya.

Study banding ke Jawa Barat diikuti oleh 30 orang, juga berlangsung selama tiga hari termasuk perjalanan. Di tempat-tempat yang dikunjungi, rombongan study banding ini diterima dengan baik oleh fihak tuan rumah, dan memperoleh informasi serta penjelasan yang dibutuhkan.

Dalam kaitannya dengan pembelajaran FMA ini, UPKG Seloprojo telah melaksanakan suatu kegiatan yang juga perlu dicatat. Kegiatan tersebut adalah dalam rangka upaya petani-petani Seloprojo untuk mengatasi penyakit *akar gada* yang menyerang tanaman kubis mereka. Pada tanggal 19 Juli 2002 sebuah tim kecil DAFEP Jakarta berkunjung ke Seloprojo. Dalam pertemuan di kantor kepala desa yang dihadiri oleh sekitar 40 orang warga Seloprojo (pemerintah desa, Pengurus UPKG dan petani biasa) petani mengemukakan masalah penyakit kubis tersebut. Tim menyarankan agar pengurus UPKG menghubungi Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Pengalengan, Kabupaten Bandung. Organisasi petani ini telah berpengalaman dan

berhasil mengatasi penyakit yang sama. Atas prakarsa UPKG, dari tanggal 13 sampai dengan 15 November 2003, Koordinator IPPHTI Pengalengan berada di Seloprojo untuk membagi pengalamannya dalam mengatasi penyakit *akar gada* dengan petani-petani setempat. Selama tiga hari tersebut diselenggarakan pertemuan di kantor pemerintah desa dan peninjauan serta praktek di lapangan. Koordinator IPPHTI menganjurkan, antara lain, agar para petani mengurangi air di lahan. Kebiasaan memberi terlampau banyak air, sampai tergenang seperti memberi air untuk padi, menyebabkan penyakit akar gada mudah menyebar dan lebih sulit diberantas.

Tindaklanjut pembelajaran

Kegiatan pembelajaran FMA di Seloprojo, khususnya yang dapat diterapkan langsung secara individual, telah memberikan pengaruh tertentu terhadap kegiatan usaha tani di desa tersebut. Petani-petani yang mengikuti pelatihan mencoba menerapkan pengetahuan baru yang diperolehnya, dan hasilnya mulai kelihatan. Petani-petani yang tidak mengikuti pelatihan, belajar dari petani-petani peserta pelatihan, baik di lahan maupun pada pertemuan-pertemuan RT, terutama Yasinan yang berlangsung setiap malam Jumat. Mereka juga ikut menerapkan.

Dalam hal pemeliharaan sapi, dewasa ini sudah sekitar 75% keluarga yang memelihara sapi jenis lemosin. Dahulu tidak ada yang berani memelihara jenis ini karena “galak”, berbahaya dan sulit dikendalikan. Memelihara sapi lemosin lebih menarik karena harga jualnya lebih

tinggi sekitar 20% daripada sapi lokal. Kandang sapi juga sudah berubah, se-tidak-tidaknya petani sudah membuat tempat makanan dari bambu tidak lagi diletakkan di lantai seperti sebelumnya. Lantai kandang dibuat miring, dibelakang lebih rendah. Petani juga sudah lebih pandai dalam memilih bibit sapi yang akan dipelihara (pemilihan bibit sangat menentukan: jika salah memilih, hasilnya tidak akan memuaskan). Komposisi makanan juga berubah, kini mereka memberi makanan yang lebih bergizi seperti yang diajarkan dalam pelatihan.

Pembuatan serta pemakaian pestisida alami merupakan hasil pembelajaran yang diadopsi oleh hampir semua petani. Kalau dahulu petani mengeluarkan Rp. 150.000,- sampai Rp.200.000,- untuk biaya pestisida sayuran seluas 0,12 ha, dengan pestisida alami mereka cukup mengeluarkan sekitar Rp. 20.000,-. Pestisida buatan sendiri yang digunakan petani untuk semua jenis tanaman ini, efektif untuk menangkal hama *ulat patek*, *lalat grayek*, dan sebagainya.

Dewasa ini sekitar 50% petani di dusun-dusun Seloprojo, Pranten dan Pernulu sudah menanam bawang daun jenis Taiwan. Di Dusun Ngaglik bahkan sudah sekitar 90%. Modal untuk mengusahakan jenis Taiwan memang lebih besar daripada jenis lokal. Selain harga bibit yang lebih mahal, jenis ini juga membutuhkan pupuk yang lebih banyak. Keuntungan juga lebih besar, bisa dua kali lipat dari jenis lokal. Pengurus UPKG yakin bahwa petani-petani yang belum mengadopsi dalam waktu yang tidak terlalu lama akan mengadopsi juga.

Pelatihan dan praktek pembenihan

telah menghasilkan sejumlah besar bibit tanaman keras. Para petani sudah memanfaatkan bibit tersebut, mereka menanam di lahan yang rawan longsor di tempat-tempat yang masih memungkinkan untuk ditanami pohon. UPKG sedang berupaya memasarkan bibit yang ada ke luar desa.

Sebagai salah satu tindak lanjut dari study banding, petani-petani Seloprojo telah membentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/PBHM. Dalam hubungan ini telah diselenggarakan suatu pertemuan dengan pihak Dinas Kehutanan. Pertemuan tersebut, yang berlangsung pada bulan April 2003, dihadiri oleh Pengurus UPKG, Pengurus Kelompok dari ketiga kelompok Seloprojo, pemerintah desa, sejumlah petani, dan utusan dari Dinas Kehutanan.

Pada pertemuan itu disepakati untuk melaksanakan kerjasama penanaman vanili di lahan dinas seluas lebih-kurang 125 ha. Dinas akan menyediakan bibit, petani mengerjakan budidayanya. Produksi akan dibagi tiga, petani dan dinas masing-masing memperoleh 42%, sedangkan sisanya, yaitu 6%, untuk pengurus PBHM. Juga disepakati bahwa kegiatan penanaman vanili akan dimulai dalam tahun 2003 ini juga. Guna merealisasikan kesepakatan tersebut, Pengurus UPKG dan Pengurus PBHM bermaksud menugasi tiga orang petani untuk magang penanaman vanili di salah satu sentra vanili di Jawa tengah.

Petani-petani Seloprojo juga telah menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari Koordinator IPPHTI Pengalengan. Meskipun penyakit tersebut belum hilang, namun sudah berkurang. Upaya untuk memberantasnya masih terus dilaksanakan.

Analisis atas pelaksanaan DAFEP di Seloprojo : beberapa faktor pendukung

Uraian di atas telah menyajikan pelaksanaan DAFEP di Seloprojo, mulai dari persiapan dan perencanaan kegiatan penyuluhan yang dikelola petani (FMA) sampai dengan tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Dalam perspektif DAFEP, hal itu berarti bahwa petani-petani Seloprojo, dibantu oleh KIPPK dan BIPPK, telah berhasil menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan paradigma baru : dari petani, oleh petani dan untuk petani. Keberhasilan tersebut dicapai karena dukungan sejumlah faktor, yang akan dipaparkan berikut ini.

Pengambilan keputusan di Seloprojo dilaksanakan melalui kelembagaan dan proses untuk menyalurkan partisipasi masyarakat, yaitu pertemuan-pertemuan mulai dari tingkat RT, RW, dusun, sampai tingkat desa. Meskipun dapat diduga bahwa banyak dari mereka yang tidak memahami arti "partisipasi", akan tetapi dalam kenyataannya mereka telah melaksanakan makna dari konsep tersebut.

Dalam pengambilan keputusan pelaksanaan DAFEP termasuk FMA, sejak awal Pengurus UPKG bersama dengan Pengurus Kelompok selalu menerapkan semangat **partisipasi** tersebut, yaitu dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang menghadirkan orang-orang yang dipandang dapat mewakili masyarakat. Cara pengambilan keputusan yang demikian menyebabkan, antara lain, terwujudnya hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, informasi dan pengenalan tentang DAFEP menyebar ke warga masyarakat pada umumnya, terutama dengan adanya

dukungan kelembagaan RT/RW yang berfungsi dengan baik. *Kedua*, peserta kegiatan perencanaan dan pembelajaran FMA tersebar secara merata di antara ke empat dusun Seloprojo. *Ketiga*, masalah-masalah usaha tani dan terkait usaha tani yang dimunculkan, adalah masalah-masalah yang dihadapi dan dirasakan oleh mayoritas petani. Usul-usul pemecahan yang muncul, pembelajaran dan non pembelajaran, dengan sendirinya juga akan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh mayoritas petani. Butir ketiga ini kiranya juga dapat menjelaskan mengapa telah banyak petani yang sudah menerapkan hasil-hasil pembelajaran FMA di usaha taninya.

Dalam kaitannya dengan pemecahan masalah, perlu dicatat bahwa Pengurus UPKG dan petani-petani Seloprojo berupaya untuk memanfaatkan pengetahuan dan teknologi sederhana dan berasal dari kalangan petani sendiri. Mereka tidak menggantungkan diri kepada hasil-hasil penelitian laboratorium yang canggih dan rumit. Dalam hal pestisida, misalnya, yang dilakukan justru “kembali ke alam”, meninggalkan pestisida industri yang dirasakan terlampau mahal. Kesederhanaan itu juga berlaku di dalam upaya penanggulangan penyakit kubis *akar gada*. Apa yang disarankan oleh Koordinator IPPHTI Pengalengan bukanlah pemberantasan dengan menggunakan pestisida industri jenis tertentu, melainkan sangatlah sederhana : kurangi volume air di lahan. Introduksi dan penerapan pengetahuan dan teknologi yang mendahulukan pengetahuan dan teknologi petani yang dikenal dengan sebutan *farmer first* ini, juga berlaku dalam pemeliharaan sapi. Baik dalam hal pakan

obat-obatan ternak, dan kandang yang memenuhi syarat, semuanya memanfaatkan bahan-bahan lokal yang mudah diperoleh petani. Adanya kedekatan antara pengetahuan dan teknologi serta bahan-bahan pendukungnya di satu fihak, dan para petani di fihak yang lain, mendorong terjadinya adopsi yang cepat dan meluas atas pengetahuan dan teknologi baru yang diperoleh dari pembelajaran FMA.

Seperti dikemukakan di depan, sebelum menjadi naskah final, proposal FMA yang disusun oleh Pengurus UPKG dibahas lebih dahulu secara terbuka di dalam suatu pertemuan khusus. Pada kesempatan itu pembahasan mengenai RAB menghabiskan sebagian besar waktu. Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dalam rangka pelaksanaan FMA, Pengurus UPKG juga mengambil kesempatan untuk melaporkan posisi keuangan, dan selalu ditanggapi oleh peserta pertemuan. Kenyataan ini menunjukkan adanya, paling tidak, dua hal berikut. *Pertama*, bahwa petani memberi perhatian yang besar terhadap aspek keuangan DAFEP/FMA. *Kedua*, Pengurus FMA menyadari perhatian yang besar itu, dan mereka berusaha untuk terbuka. Keterbukaan Pengurus UPKG dalam mengelola keuangan menyebabkan mereka tetap dipercaya oleh para petani.

Melalui penanaman rumput di lahan Kehutanan, petani-petani Seloprojo memperoleh pengalaman melakukan kolaborasi dengan fihak luar desa, dalam hal ini Dinas Kehutanan Magelang. Pengalaman itu dimanfaatkan untuk menjajaki kolaborasi lebih lanjut dalam penanaman vanili, seperti dikemukakan di atas. Kemampuan mengelola kegiatan kolaboratif juga ditunjukkan dalam mengintegrasikan dua

proyek, yaitu Taskin yang di Seloprojo menjadi tanggungjawab pemerintah desa, dan DAFEP/FMA yang menjadi tanggungjawab Pengurus FMA. Kolaborasi dan integrasi itu menguntungkan kedua proyek : DAFEP/FMA memperoleh bahan-bahan dari Taskin yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, sedangkan Taskin memperoleh manfaat dengan adanya pembelajaran FMA yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dari kegiatan-kegiatannya.

Salah satu isu yang sering dimun-

culkan dalam berbagai pembicaraan tentang DAFEP, resmi atau tidak, adalah kesulitan petani untuk terlibat aktif dalam proyek tersebut karena tidak terbiasa melakukan kegiatan baca-tulis. Kesulitan itu juga dialami oleh petani-petani Seloprojo. Namun secara bijak mereka mencari jalan keluarnya, yaitu dengan melibatkan lebih banyak pemuda lulusan SMP dan SMU. Keterlibatan para pemuda tersebut membantu kelancaran pelaksanaan FMA, terutama pada tahap perencanaan. (sh)

PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN/BPP DI ERA OTONOMI DAERAH

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah mengakibatkan berubahnya pola hubungan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam berbagai kewenangan. Perubahan kewenangan tersebut telah memberi dampak kepada perubahan baik dalam penyelenggaraan, maupun kelembagaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota.

Sebenarnya visi dan misi yang terkandung dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999, tersurat baik dalam bagian konsideran maupun bagian dari penje-

lasannya, antara lain disebutkan : “bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peningkatan peranserta masyarakat serta memperhatikan potensi dan keanekargaman daerah (konsideran)”, sedang dalam bagian penjelasan ditekan bahwa Undang-undang ini mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pembangunan.

Sejalan dengan itu, Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, sejak tahun 2001 dengan bantuan

dana dari Bank Dunia menyelenggarakan suatu proyek yang dikenal dengan “*Decentralize Agriculture and Forestry Extension Project (DAFEP)*” atau Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (PDPPK). Proyek ini diselenggarakan di 16 kabupaten pada 9 propinsi terpilih.

Salah satu kegiatan proyek yang sangat berbeda dengan kegiatan-kegiatan proyek sebelumnya adalah yang disebut dengan FMA atau singkatan dari *Farmer Management Extension Activity* dimana dalam kegiatan ini penyuluhan pertanian dikelola oleh para petani sendiri, penyuluhan pertanian dari semenjak merencana-

kan kebutuhan belajar, menetapkan metoda dan proses belajar mengajar serta penilaiannya dilakukan secara bersama secara partisipatif dalam kelompok. FMA merupakan pemberdayaan petani beserta keluarganya untuk berkreaitif, berdemokrasi, berswadaya serta bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan sesuai dengan harapan dari diberlakukannya otonomi daerah.

Dengan dikelolanya penyuluhan pertanian dari, oleh dan untuk petani, maka peranan penyuluh pertanian tidak lagi melakukan proses belajar mengajar pada pelaksanaan penyuluhan pertanian tetapi berubah fungsinya menjadi fasilitator. Na-



Merencanakan dan menetapkan metoda proses belajar-mengajar

mun nampaknya pengelolaan penyuluhan oleh petani hanya terjadi di desa-desa yang terkena sasaran proyek DAFEP, malah dalam satu kecamatan yang menjadi lokasi proyek ada yang belum semua desanya melakukan itu. Pada desa-desa yang belum melaksanakan kegiatan tersebut para penyuluh pertanian masih tetap seperti semula. Dalam keadaan yang demikian dalam satu kecamatan peranan para penyuluhnya adalah melakukan kegiatan penyuluhan dan melakukan fasilitasi pada kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh para petani. Keadaan demikian perlu adanya pengembangan dalam penyusunan Perencanaan Penyuluhan di tingkat Kecamatan atau Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang biasa disebut Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP.

Prinsip dasar penyusunan Programa Penyuluhan

Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian menganut prinsip dasar sebagai berikut :

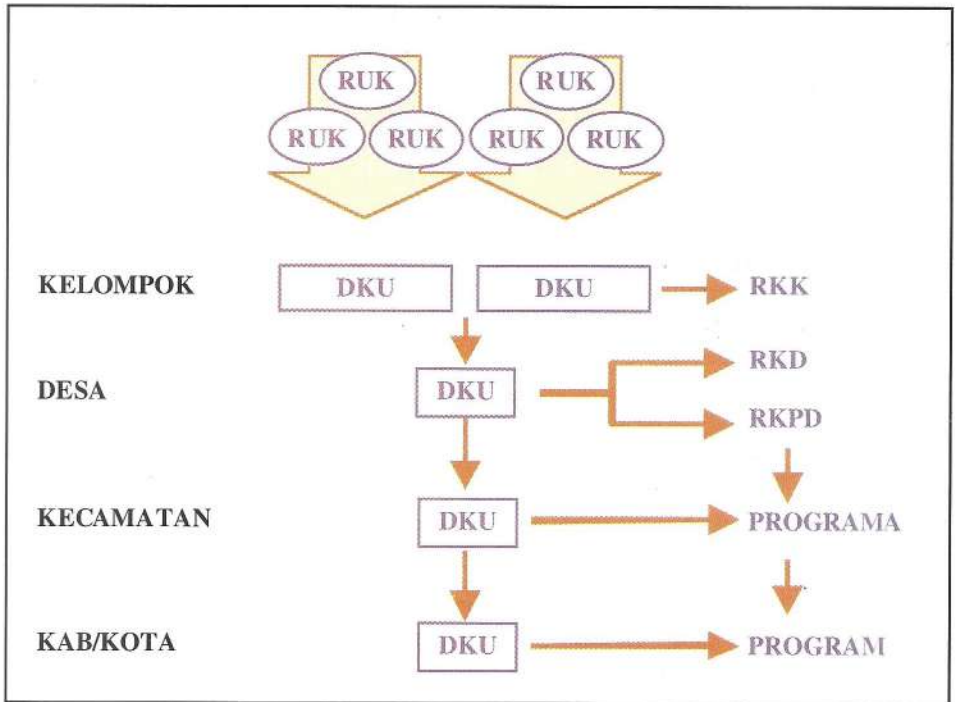
- a. *Berorientasi pada kebutuhan petani* : rencana kegiatan/proses belajar mengajar yang menjawab kebutuhan petani beserta keluarganya dalam menyelenggarakan usahatani.
- b. *Partisipatif* : petani secara bersama dalam kelompok yang difasilitasi penyuluh pertanian mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam usahatani serta memilih dan menyepakati langkah-langkah pemecahannya baik yang akan dilakukan sendiri, secara bersama dalam kelompok atau untuk mendapat bantuan dari para penyuluh atau pihak lainnya.

- c. *Sistimatis, terukur dan berkelanjutan* : Programa Penyuluhan disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang telah disepakati seperti tercantum dalam buku acuan penyusunan programa penyuluhan pertanian. Terukur artinya kegiatan yang dilakukan jelas tujuannya, mudah dilakukan namun mampu secara efektif menjawab kebutuhan petani. Berkelanjutan artinya selalu dilakukan evaluasi dan monitoring untuk dinilai keberhasilannya secara bersama serta terus diperbaiki dan dikembangkan untuk lebih baik lagi.

Identifikasi kebutuhan petani beserta keluarganya.

Untuk menetapkan kebutuhan para petani dalam usahatani guna penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dilakukan identifikasi kebutuhan seperti digambarkan dalam bagan.

- Setiap keluarga tani harus sudah memiliki Rencana Usahatani Keluarga (RUK) yang disusun setelah mengikuti PRA Desa serta menyusun profil keluarga.
- Secara bersama sama kelompok membuat daftar kebutuhan usahatani baik yang mengenai sarana/prasarana usaha maupun kebutuhan yang bersifat pengetahuan, keterampilan/kecakapan dan sikap (Prilaku/PSK). Dari hasil musyawarah kelompok dihasilkan suatu daftar kebutuhan usaha keluarga (DKU) secara berkelompok. Apabila ada kebutuhan yang dirasakan oleh para petani tersebut bisa dipenuhi oleh kelompok, maka kegiatan tersebut dijadikan Rencana Kegiatan Kelompok (RKK).



- Masing-masing wakil kelompok membawa daftar kebutuhan usahatani perkelompok dan melalui musyawarah-mufakat dalam suatu pertemuan membuat Daftar Kebutuhan Usaha secara gabungan dalam suatu wilayah kerja Desa (DKU-Desa). Dari DKU yang sifatnya non perilaku dijadikan bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang merupakan bagian dari Rencana Kegiatan Pembangunan dari desa yang bersangkutan. Dari DKU-Desa yang sifatnya Perilaku (PSK) dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa (RKPD).
- Bila masih DKU-desi yang belum dapat dipenuhi oleh RKPD, maka DKU

tersebut disampaikan ke Kecamatan/BPP. Rekapitan DKU-desi menjadi bahan untuk Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP. Termasuk dari desa-desa yang belum mampu menyusun RKPD-nya.

- Demikian selanjutnya dari daftar Kebutuhan Desa yang belum dapat dipenuhi oleh kecamatan/BPP menjadi bahan untuk penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota.

Penyusunan rencana kegiatan

Rencana kegiatan dalam program penyuluhan pertanian kecamatan/BPP merupakan suatu daftar seperti dijelaskan dalam

SEKRETARIAT UPKG KURIPAN SELATAN

Sebelumnya bernama
Balai Pertemuan Petani

Dengan semangat kepemimpinan yang inovatif dan partisipatif, kini Marsam Suma (35 tahun) telah mampu membawa nama baik kelompok taninya. Perencanaan dan kegiatan kelompok telah memberi arti penting bagi kemajuan agribisnis di desa Kuripan Selatan. Musyawarah kelompok berjalan baik. Ini berarti telah terbangun komunikasi, interaksi, sinkronisasi, dan koordinasi antar anggota kelompoknya baik dalam membuat kesepakatan, mengatur kegiatan kerjasama kelompok maupun kegiatan usaha bersama petani dalam upaya mengembangkan agribisnisnya



Marsam Suma dikenal sebagai petani pemimpin yang penuh kreasi.



Sekretariat UPKG Kuripan selatan, Lombok Barat.

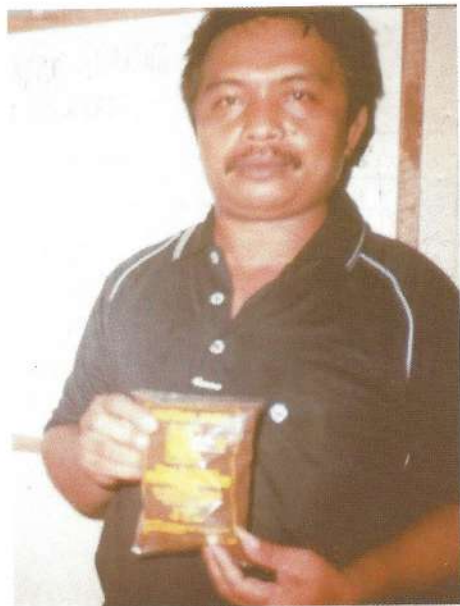
Potensi pertanian dibaca dengan seksama

Selaku ketua UPKG Kuripan Selatan, Marsam Suma dalam mengajak rekan petani beragribisnis selalu berorientasi kepada pengembangan komoditas spesifik lokalita. Sejalan dengan itu, UPKG sebagai wadah untuk bekerjasama 12 gabungan kelompok tani ini telah banyak memfokuskan kegiatan dibidang pengembangan inovasi/teknologi dan pelatihan petani, walau peneliti dan pelatuhnya dari petani sendiri. M. Nasrah sebagai pendamping penyuluh setempat mengakomodasi kreasi petani di wilayahnya, sehingga proses

tansfer inovasi antar petani berjalan dengan mulus. Berbagai jenis tanaman yang tersedia di lokasi tersebut dijadikan bahan baku untuk merakit teknologi (tradisional) hingga terwujudnya produk agribisnis yang laku di pasaran. Berbagai contoh inovasi petani seperti berikut :

1. Bibit sawo cangkokan ala Fajarudin.
Produk ini telah banyak dipasarkan dengan harga Rp 5.000,- per tanaman. Waktu lamanya pencangkokan dipercepat dari cara biasa 8-9 bulan menjadi 4 bulan. Proses sederhana dengan mengerok/membuang lapisan kulit luar batang kemudian diberikan bubuk pepsin (sasa miwon) ditutup lapisan tanah campur daun pisang dicincang kering.
2. Tanaman ketimun sistem bisi (kawin silang).
3. Memproduksi telur asin merupakan kegiatan bisnis sampingan sebagian masyarakat di desa ini. Dipasarkan dengan "kemasan khas" menarik bagi para konsumen luar daerah. Pengasinan telur bebek, diproses dengan bahan abu gosok, lengkuas, garam, dan penyedap rasa.
4. Berbagai produk olahan dari bahan baku mengkudu : a) sirup mengkudu berupa sari mengkudu hasil proses fermentasi yang berlangsung selama 1 bulan; 2) teh dari mengkudu; 3) kopi instan, hasil cincangan mengkudu yang dijemur hingga kering dan disangreh (goreng) dan dicampur kedele setelah digoreng secara terpisah. Kopi instan ini di pasarkan keluar desa/kecamatan dengan kemasan menarik yang telah disahkan Depkes RI; 4) berbagai jenis obat-obatan berupa

kapsul. Contoh kapsul obat maag yang terbukti manjur dibuat dari mengkudu dicampur lapisan kuning ampela hati ayam yang telah dicuci bersih dan digoreng/sangrah. Harga kapsul Rp 75,- per biji. Potensi mengkudu cukup besar di Kuripan Selatan. Guna memenuhi kebutuhan bahan baku produk-produk olahan tadi, maka petani harus mengintensifkan budidaya tanaman mengkudu termasuk perbaikan panennya. Karena untuk kebutuhan bahan baku memproses kopi instan saja diperlukan "mengkudu super". Dengan ciri-ciri mengkilat, matang sempurna, ukuran besar/normal. Mengkudu mengandung zat anti bakteri, nutrisi, vitamin dan protein.



Produk olahan mengkudu "kopi instan" pasarnya semakin luas.

Kopi instan dipasarkan secara rutin rata-rata sebanyak 50 kg per hari, dikirim ke pusat-pusat kota Lombok, Bali, dan Sumbawa. Produk petani UPKG Kuripan Selatan yang satu ini memiliki daya tarik pasar tersendiri. Tertera di label kemasan, khasiat dan kegunaannya dapat menurunkan tekanan darah tinggi, meningkatkan kekebalan tubuh, menanggulangi penyakit amandel, menanggulangi penyakit batu ginjal, reumatik, menambah nafsu makan, mengobati penderita demam dan malaria, sariawan, batuk rejang, batuk darah, batuk disentri, menanggulangi penyakit tumor dan lever.

UPKG Kuripan Selatan menjadi pusat pelatihan dan informasi agribisnis komoditas unggulan spesifik lokalita

Desa Kuripan Selatan, kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang berada pada posisi ketinggian rata-rata 5° meter diatas permukaan laut. Desa ini di sebelah utara berbatasan dengan Kel. Kuripan, sebelah Selatan desa Ranggeyate-Loteng, sebelah Barat desa Tempos/ Gunung Sasak, dan sebelah Timur desa Labulie-Loteng. Kuripan Selatan ini dikenal memiliki sumber daya alam (SDA) pertanian yang cukup potensial untuk dikembangkan, seperti tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Luas lahan 1.063 Ha, terdiri dari sawah 260 Ha, ladang/tegalan 345 Ha, perkebunan rakyat 35 Ha, hutan 400 Ha dan pekarangan serta kolam seluas 22,75 Ha. Dari luasan tersebut kini seluas 663 Ha telah digarap masyarakat tani untuk kegiatan pertanian menopang kehidupannya. Sekalipun hanya seluas 200 Ha saja dari

jumlah luasan tersebut yang dinyatakan sebagai tanah subur. Namun berkat ketekunan petani, kini Desa Kuripan Selatan telah mampu memproduksi berbagai komoditi pertanian, seperti palawija : kedelai 1.128 ton/ha, kacang tanah 0,826 ton/ha, kacang tunggak 0,46 ton/ha, kacang hijau 0,41 ton/ha, jagung 2,032 ton/ha, ubi jalar 8,29 ton/ha dan ubi kayu 7,61 ton/ha; padi sawah 4.949 ton/ha; perkebunan : kelapa 26.000 butir/ha, kapas 1,2 ton/ha dan jambu mete 0,5 ton/ha). Produksi tanaman sayuran : tomat 1,35 ton/ha, terung 0,42 ton/ha dan cabe 0,67 ton/ha. Produksi buah-buahan : pisang 2,6 ton/ha, mangga 4,8 ton/ha, semangka 3,5 ton/ha, kedondong 0,6 ton/ha dan sirsak 0,7 ton/ha. Peternakan : yang dominan ayam 4.209 ekor dengan peternak 842 kk, kerbau 396 ekor dari 136 kk, dan kambing 196 ekor dari 73 kk.

Kelompok tani yang selama ini aktif melaksanakan kegiatan berjumlah 12 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan antara 30–84 orang, yang terdiri petani dewasa, wanita tani dan taruna tani. Dilihat dari kacamata Gender Mainstreaming, maka hampir setiap kelompok tani yang ada nampak adanya kejelasan peran wanita baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tani. Jumlah anggota perempuan pada setiap kelompok berkisar antara 5–25 orang, sedangkan jumlah anggota dari pemuda tani/taruna tani komposisinya hampir sama jumlah anggota wanita tani pada setiap kelompoknya.

12 kelompok tani yang tergabung dalam aktivitas UPKG ini menunjukkan kerjasama baik. Sinkronisasi berbagai kegiatan terjadi dalam koordinasi para

pengurus UPKG, petani pemandu dan para ketua kelompok tani terkait.

Sebagai pusat informasi dan pembinaan sosial kemasyarakatan

Ruang Sekretariat UPKG seluas 9 x 5 meter persegi digunakan untuk pertemuan petani, pelatihan, dan pusat informasi pertanian. Dalam mengembangkan keinformasian ini, diadakan kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan baik para pengurus UPKG, Petani Pemandu dan ketua kelompok tani. Kegiatan ini berupa perencanaan dan pembuatan media informasi, sekaligus penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi/inovasi pertanian sesuai dengan kebutuhan petani setempat.

Sejalan dengan misi UPKG terutama mengemban tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya ma-

nusia pertanian, selain pelaksanaan pendidikan petani, telah pula dirintis berbagai upaya pembinaan sosial kemasyarakatan, yaitu :

- **Sekolah PADU (Pendidikan Dini Usia)**
Pendidikan bagi anak keluarga kurang mampu.
- **PHB AF (Aksara Fungsional)**
Pendidikan pengenalan huruf yang diikuti 8 orang dengan kelompok Mete Maju (kelompok mau maju).
- **Koperasi Harapan Karya**
Tempat/kantor Koperasi Harapan Karya bersebelahan dengan Sekretariat UPKG).
- **Kelompok Usaha Bersama (KUB)**
ekonomi lemah sejak 1996 memiliki modal awal Rp 15 juta digunakan untuk usaha simpan pinjam, dan memiliki lumbung pangan dengan simpanan gabah sebanyak 10 ton. (san)

UPKG BEDA DENGAN KELOMPOK LAIN

DAFEP adalah salah satu proyek penyuluhan pertanian dan kehutanan yang bertujuan untuk memberdayakan petani. Dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip **partisipatif, demokratis, desentralisasi, keterbukaan, akuntabilitas, kemitraan dan kemandirian.**

Sementara itu di daerah tertentu juga sedang dilaksanakan program yang sama, yakni menerapkan prinsip-prinsip terse-

but, antara lain SL PHT (Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu, SL UBA (Sekolah Lapangan Usaha Berorientasi Agribisnis), KUF (*Kalimantan Up-land Farming*), meskipun kelompok tani binanya tentu memiliki perbedaan dengan kelompok tani yang tergabung dalam UPKG (Unit Pengelolaan Kegiatan Gabungan) yang dikembangkan DAFEP. KBIPP (Kantor Balai Informasi Penyuluhan Pertanian) Kabupaten/Kota Kolaka,

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu bentuk kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam satu manajemen, artinya seluruh tolok ukur (1) bentuk kelembagaan; (2) tugas pokok dan fungsi (3) kewenangan dan (4) penyelenggaraan penyuluhan pertanian terdapat pada satu jenis kelembagaan. Dengan demikian seluruh hasil akhir penyelenggaraan penyuluhan pertanian dipertanggungjawabkan oleh satu kelembagaan. Berikut ini paparan wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kab/Kota Kolaka, Sulawesi Tenggara, Bapak Ir. Muh. Adur Ridwan, M.Si.

Kebijakan operasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah Bapak, tentunya sudah ada. Bagaimana menurut pandangan Bapak, termasuk kelembagaan tani yang dikembangkan DAFEP, seperti FMA, FET, UPKG ?

DAFEP dalam hal ini kelembagaan KBIPP sebagai binaannya dikaitkan dengan program dinas lingkup pertanian, khususnya dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, sangat bermanfaat dalam hal peningkatan sumberdaya manusia pertanian, selain penyuluh pertanian dengan ditunjang dana DAFEP. Penyediaan dana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mendukung pengembangan sumberdaya manusia pertanian relatif sedikit dibandingkan dengan dana DAFEP, sehingga akan lebih mempermudah upaya peningkatan sumberdaya manusia.

Kelembagaan tani seperti UPKG yang telah terlatih biasanya sudah lebih siap mengimplementasikan program dinas di-

bandingkan yang belum memperoleh pelatihan peningkatan sumberdaya manusia, antara lain bantuan dan fasilitasi traktor dan pompa air.

UPKG–Mowewe, misalnya mengundang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai narasumber dalam rangka study banding ke Kab/Kota Sidrap dan Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan lain, seperti seminar penyuluhan pertanian dalam rangka perbaikan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, terutama dari Perguruan Tinggi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Pelaksanaan SL Perkebunan, misalnya melibatkan penyuluh pertanian sebagai pendamping dan hal-hal tersebut diatas dibicarakan dalam pertemuan Komisi Penyuluhan Pertanian .

Kegiatan yang akan datang berupa orientasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian daerah dalam bulan Desember 2003 guna persiapan Penas XI tahun 2004 ke Manado Sulawesi Utara.

Organisasi/kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani, termasuk P3A yakni melalui pendekatan partisipatif, tentunya akan semakin pintar dan UPKG dibandingkan dengan kelompok tani yang telah eksis sekarang ini memiliki perbedaan, yakni adanya penyusunan rencana dari bawah/bottom up.

Seperti yang diinginkan DAFEP bahwa program dan program penyuluhan pertanian dan kehutanan ditetapkan berdasarkan masukan dari bawah/bottom up melalui kelembagaan tani dari tingkat desa sampai di tingkat kabupaten/kota. Apakah hal tersebut menurut pendapat

Bapak sudah mendukung Program dinas pertanian dan hortikultura dilihat dari aspek penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan. Selanjutnya dalam menentukan program dan program penyuluhan pertanian dan kehutanan itu apakah dilakukan survey tahunan ?

Program dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura diakomodasikan menjadi program dan program penyuluhan pertanian di kab/kota Kolaka, termasuk substansinya/materi dan hal-hal yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, kemudian dijabarkan dan diakomodasikan dari bawah melalui pertemuan sekali dua minggu termasuk KCD di BPP.

Apakah Bapak percaya bahwa sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan yang diselenggarakan / DAFEP sudah dirancang untuk mengembangkan model-model pemberdayaan petani ? Jika sudah ataupun belum bagaimana menurut Bapak dan seharusnya bagaimana ?

Saya sangat yakin dengan melihat materi yang dirancang mulai dari bawah/ bottom up, a.l. konsep Universitas Halu Oleo dan LSM dibandingkan dengan konsep DAFEP, bila dilihat secara nasional maupun regional yang tentunya dikaitkan dengan kultur spesifik lokasi daerah sasaran.

Pelayanan penyuluhan pertanian yang diselenggarakan di wilayah bapak, menurut bapak apakah sekarang ini memiliki nilai positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan petani ?

Secara langsung PAD tidak berpengaruh terhadap besarnya sumbangan sektor pertanian, tetapi harus melalui proses yaitu dengan naiknya pendapatan petani tentunya penarikan pajak dari masyarakat/ petani, juga akan meningkat. Selain itu, petani juga akan terus memperbaiki rencana usaha taninya yang menguntungkan, tentunya dengan melihat prospek/peluang bisnis.

Instansi teknis bukan penarik pajak tetapi kelembagaan yang membina dan memfasilitasi masyarakat.

Hal tersebut pernah disarankan Komisi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan kepada DAFEP jika dimulai pemberdayaan petani model DAFEP ini dan diikuti dengan paket (tidak 100% untuk peningkatan sumberdaya manusia), karena dinas itu pada umumnya terbatas dalam memenuhi kebutuhan UPKG, maka diseleksi UPKG-UPKG yang sekiranya sudah siap, baik untuk fasilitasi fisik maupun non fisik dalam rangka pengembangan komoditas tentunya difasilitasi untuk pengembangan di lapangan.

Dalam menumbuhkembangkan sekaligus menerapkan prinsip-prinsip partisipatif seperti diuraikan di atas, maka proyek DAFEP memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan yang dikelola petani atau Farmer Managed Extension Activities (FMA).

Penjelasan bapak tentang FMA tersebut bagaimana? Selanjutnya apakah ada langkah-langkah yang sudah dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam hal : (1) Pengorganisasian penyuluh pertanian dan kehutanan, (2) Pengorga

nisasian petani, (3) Kelembagaan penyuluhan pertanian dan kehutanan

Sewaktu pembentukan KBIPP Kab/Kota Kolaka itu, saya dengan teman-teman berjuang dan akhirnya dibahas di DPR. Prinsip-prinsip penyuluhan pertanian itu saya yakin tidak akan hilang tetapi untuk lebih menjamin hal tersebut, didukung dengan Undang-undang Penyuluhan Pertanian. Kalau saya justru melihat dari azas manfaatnya sehingga dengan otonomi daerah ini kalau yang ada sekarang itu sudah dianggap lebih efektif dan efisien, maka ada baiknya dipilah-pilah saja urusan itu mana yang di kedaerahkan atau dilihat dari aspek kemampuan daerah.

Eksistensi KBIPP Kab./Kota Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara bagaimana setelah DAFEP selesai ?

Saya justru mengaitkan dengan PP Nomor 8/2000, tentang Pemerintah Da-

erah Kab/Kota, yang dipertanyakan justru kehadiran suatu kelembagaan itu apakah bermanfaat atau tidak ? Kalau digabung dengan dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura misalnya, tugasnya akan lebih berat, sebaiknya dinas itu tinggal memanfaatkan saja sumberdaya manusia pertanian yang sudah siap agar lebih efektif dan efisien. Pada akhirnya diperlukan evaluasi termasuk dinas juga akan dibahas.

Akhirnya saya jelaskan bahwa seperti diketahui dan disiarkan dimana-mana bahwa pembangunan ekonomi menempatkan sektor pertanian sebagai sektor prioritas. Penjelasan itu tampaknya hanya slogan dilihat dari besarnya anggaran Tk. I dan Tk. II yang mendukung pembangunan sektor pertanian. Hal ini dibahas di DPR, dan anggota DPR yang terhormat apakah masih konsisten dengan visi daerah yakni mewujudkan sistem dan usaha agribisnis dan pertambangan. (sh)

KOLABORASIPUN BERUJUNG PRESTASI

Konsep DAFEP boleh dibilang universal untuk tingkat semisal kabupaten dan tidak berlebihan andaipun diangkat ke tingkat nasional untuk negeri sebesar ini yang memiliki keragaman budaya dan tipe-tipe sosial yang beragam.

Lalu yang namanya **kolaborasi** yang terdapat didalamnya adalah salah satu

komponen penting dari bingkai besar DAFEP yang dikembangkan ke setiap institusi dimana DAFEP berada. Karakteristik dari kegiatan kolaborasi ini adalah membentuk kerjasama teknis lintas lembaga, antara BIPP/KIPP/KIPPK dengan lembaga-lembaga yang diajak berkolaborasi dengan asumsi konkrit bahwa masing-masing mempunyai kewajiban



memberikan kontribusi kelebihan kemampuan teknis dibidangnya yang lantas dapat diajarkan kepada petani.

Di Kupang kolaborasi sudah merambah tidak hanya dengan kelembagaan di lingkungan pertanian, tapi telah menggandeng lembaga pendidikan dan penelitian serta dengan lembaga swadaya masyarakat yang ada di kabupaten itu. Kolaborasi yang dikembangkan bentuknya bermacam-macam. Diantaranya kerjasama teknis dengan BPPT Naibonat misalnya. Lembaga ini merancang berbagai penelitian dengan melibatkan petani dan penyuluh. Lahan yang digunakan pun milik petani. "Agar bentuk penelitian yang dirancang itu sesuai dengan kondisi lahan dan jenis komoditi yang dibudidayakan" kata Ir. Made Ratnada, M.Si. seorang penyuluh di BPPT

Bentuk kerjasama teknis semacam ini tentu saja memberikan keuntungan yang signifikan bagi petani. Petani dapat mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk nyata, dapat melihat dan mempraktekkan langsung di lapangan, seperti bagaimana mengukur keasaman tanah, bentuk dan contoh jenis-jenis tanah yang cocok dengan komoditi yang akan diusahakan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Agustin K. Meok, salah seorang peserta pelatihan, bahwa petani lebih cepat mengerti ketimbang teori di kelas, ketika ditanyakan bagaimana kesannya selama mengikuti pelatihan.

Tidak hanya petani yang mengambil manfaat dari bentuk kolaborasi seperti ini, penyuluhpun dapat menambah pengalaman dan keterampilan yang berharga. Sebab keterampilan lapangan bagi se-

orang penyuluh merupakan bekal sebagai materi yang akan disuluhkan. Bagaimana seorang penyuluh memberikan bimbingan sementara dia sendiri tidak pernah mengalami secara pribadi cara-cara atau praktek di lapangan. Ia bahkan harus bisa menempatkan diri sebagai orang yang paling awal mengetahui teknologi pertanian yang baru. “Kolaborasi yang dikembangkan DAFEP memberikan manfaat ganda” jelas Martha R. Lado yang ditemui di tengah pelaksanaan pelatihan Sampel Tanah di Lahan Petani. “Pertama, teknologi itu langsung diserap oleh petani, dan yang kedua, kerjasama peneliti dan penyuluh dalam penyebaran teknologi semakin terkoordinasi secara komprehensif”.

Selain penyuluh, disanapun ada petani pemandu yang kerap dijadikan sebagai tokoh dan panutan bagi sebagian besar petani sesamanya. Menyikapi kolaborasi

yang dikemas oleh DAFEP, bagi seorang petani pemandu kolaborasi merupakan pintu gerbang ke arah kemajuan usahatani. Kolaborasi baginya dapat melancarkan akses terhadap teknologi yang dihasilkan lembaga penelitian semacam BPPT. Hasil riset yang dilakukan oleh pakar penelitian yang sarat dengan sifat-sifat kekhasan lokasi setempat (*local specific*), menurut seorang petani pemandu akan mempercepat penyebaran teknologi hasil rekayasa penelitian ke tangan petani yang membutuhkannya.

“Awalnya agak tersendat”, jelas Ir. Yohana Koeain, M.Si. ketika ditanyakan pengalamannya dalam menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang setingkat lebih tinggi hirarki eselonnya. Menurutnya para pejabat disini kadang masih melihat struktur kelembagaan kegiatan itu berada tanpa mendalami fungsi dan ur



gensinya. Namun berkat kegigihannya dalam mensosialisasikan esensi kolaborasi yang mengusung misi pemberdayaan petani, lembaga-lembaga tersebut belakangan justru memberikan dukungan lebih besar, seperti memfasilitasi kemitraan pemasaran dengan pihak swasta. “Ini sungguh surprise, petani disamping mendapat keterampilan juga dapat menjual hasil panennya dengan harga yang memadai”, lanjut Yohana yang selama tiga tahun berturut-turut menjadi pimbagro DAFEP Kupang.



Ir. Yohana Koeain, M.Si., Pimbagro DAFEP Kupang.

Dampak dari kolaborasi dengan BPPT- Naibonat bagi kelompok tani yang tergabung dalam UPKG Tuatuka misalnya, telah meningkatkan pendapatan peta-

ni berkat jalinan kemitraan dalam pemasaran benih jagung yang diantarpulaukan. Kegairahan menanam jagung berkualitas juga nampak di setiap lahan petani desa Tuatuka yang kebetulan memiliki sumber daya air yang cukup dibanding dengan desa-desa lain di Kabupaten Kupang. Menurut Agusthen K. Meok bibit jagung yang dijual dihargai Rp. 1.000,-/kg, sementara harga jagung biasa di pasar tradisional Rp. 700,-/kg. “Selisih harga sebesar Rp. 300,- setiap kilogramnya bagi kami sangat berharga”, jelas Agusthen dengan logat Timor yang kental yang sehari-hari menjabat sebagai ketua UPKG.

Begitupun dengan petani yang memelihara ternak sapi potong mendapat keuntungan serupa berkat kolaborasi yang dijalin antara DAFEP Kabupaten Kupang dan BPPT-Naibonat. Sapi-sapi yang seperti pada umumnya di tanah Timor dilepas bebas berkeliaran di padang savana, kini setelah mendapat sentuhan teknologi yang dikembangkan BPPT sapi tersebut dikandangkan pada kandang-kandang sempit selebar ukuran sapi agar tidak banyak bergerak, lalu diberikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan standar yang diperkaya dengan kalori dan zat-zat makanan lainnya. Perlakuan ini diberikan secara intensif dan dicatat perkembangannya setiap hari. Hasilnya membuktikan bahwa ada kenaikan bobot sapi dengan kisaran antara 0,6-0,8 kg perhari. Sekarang tinggal menghitung saja berapa keuntungan yang akan didapat petani setelah berjalan tiga bulan sebagai waktu ideal untuk dilepas ke pasaran.

Kolaborasi pun terus dibentangkan, dengan perguruan tinggi, dengan lembaga

swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga lain seperti lembaga keuangan mikro semisal KUD dan pusat-pusat koperasi lainnya. Kolaborasi dengan Politeknik Pertanian, Universitas Nusa Cendana dijalin dalam bentuk model-model penyuluhan kreatif, begitu orang kampus menyebutnya. Formatnya seperti ini, pertama diadakan terlebih dahulu survey lapangan ke lahan petani. Dari hasil survey tersebut lalu dibuatlah rancang bangun pola tanam, katakanlah untuk jagung dengan menggunakan beberapa sampel pola tanam yang berbeda. Dari beberapa pola tanam yang dirancang terdapat pola tanam yang lazim dibuat petani. Setelah itu diberikan perlakuan pemupukan yang berbeda dari satu pola tanam ke pola tanam lainnya. Begitupun dengan penyirangan tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya.

Setiap periode tertentu dicatat perkembangannya dan pada saat itu pula petani diajak mengamati perkembangan dari masing-masing perlakuan. Hasil perkembangan tersebut lalu didiskusikan diantara mereka dibawah bimbingan para pakar perguruan tinggi. Inilah yang disebut dengan penyuluhan kreatif lagi partisipatif.

Lain halnya dengan LSM, kolaborasi itu bergumul dengan pemberdayaan petani berperspektif gender. Wanita misalnya, yang dalam beberapa aspek kehidupan rumah tangga harus tersingkir dalam pengambilan keputusan, namun dalam kesehariannya ternyata beban pekerjaan yang dipikulnya tidak jauh berbeda dengan kaum lelaki. Inilah yang menjadi fokus perhatian untuk diperbaiki dan

dikembangkan. Kolaborasi yang dijalin pun dimulai dengan pelatihan-pelatihan kesadaran gender yang dapat mengangkat privilege seorang wanita yang diikuti kemudian dengan pelatihan keterampilan teknis, seperti teknologi pasca panen kemasan asam gunung yang baru-baru ini dilaksanakan.

Pemasaran asam gunung selama ini dilakukan dengan cara-cara tradisional bahkan sedikit menyimpang dari etika pemasaran yang benar, seperti penurunan kualitas barang yang akan dijual dengan menambahkan bahan campuran untuk menambah bobot timbangan. Cara seperti ini sepintas menguntungkan, tapi ternyata hanya ada penambahan nilai harga penjualan yang relatif minim.

Belakangan setelah mendapat sentuhan teknologi kemasan yang menarik, kemasan itu ternyata dapat mendongkrak harga jual hingga mencapai puluhan ribu rupiah per 50 kg. "Kami sekarang baru sadar bahwa cara-cara penjualan selama ini hanya mengejar untung sementara", ujar Silvester Kapitan, Sekretaris UPKG Kotabes yang terlibat langsung dengan kegiatan gender.

Gambaran kolaborasi yang terjalin dengan berbagai institusi memberikan indikasi kuat bahwa secara teknis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya petani. Dan dampak dari kegiatan inipun dapat melancarkan perekonomian di pedesaan dengan semakin meningkatnya pendapatan petani.

Siapapun kini boleh mengatakan bahwa kolaborasi berujung prestasi itu benar. (*r_one*)

SUNARTO

Ketua UPKG Desa Deyangan

Sungguh tepat memang bila anggota-anggota UPKG desa Deyangan yang berjumlah sembilan kelompok memilih Sunarto sebagai ketua UPKG desa Deyangan, kecamatan Martoyudan kabupaten Magelang. Usianya masih muda, dinamis dan pandai berbicara. Ada sebanyak 733 KK di desa Deyangan memberikan kepercayaan kepada Sunarto dan ia pun siap untuk mewujudkan harapan para anggotanya menuju yang lebih baik. Menurutny, ia mengenal dunia luar karena DAFEP.

Sunarto memulai usahanya sejak tahun 1996. Ia bergerak dalam usaha kripik singkong. Setelah sekian bulan lamanya, sebelum DAFEP masuk sangat sulit untuk mengembangkan usahanya. Pada saat itu pemasaran yang dilakukan *door to door*. Sulit berkembangnya karena belum mengenal dunia luar. Informasi dari teman-teman hanya terbatas pada teman yang dekat saja, apalagi untuk mengenal dinas-dinas terkait yang membantu dalam hal pengembangan teknis pengolahan makanan, belum pernah. Syukurlah DAFEP datang, kami senang.

Sebelum menjadi pengurus (masih anggota biasa) ia dengan teman-temannya mengikuti pelatihan pengolahan makan yang kegiatannya dari DAFEP. Baginya tidak mengalami kesulitan dalam menjalani praktek pengolahan makanan karena sebelumnya memang sudah pekerjaannya sehari-hari.



Sunarto, Ketua UPKG Deyangan

Ada sisi lain baginya yang belum pernah ia dapatkan yakni diajarkan bagaimana mencari peluang pasar dan memanfaatkannya serta dapat saling tukar-menukar informasi dengan sesama rekan dan juga belajar menghitung rugi-laba. Sisi lain yang mengesankan saya, yakni menambah kepastian saya, menambah semangat saya, menambah keyakinan saya dalam berusaha dibidang pengolahan kripik singkong dan kripik pisang, katanya setelah ia mengikuti pelatihan yang dilakukan DAFEP. Pelatihan lainnya yang pernah diikutinya, yaitu manajemen usaha dan perkoperasian. Kini, ia sering diajak



untuk mengisi produknya pada saat pameran berlangsung. Memang banyak informasi yang ia dapatkan setelah mengikuti kegiatan DAFEP. Menurutnya, dulu tidak tahu program-program yang dikembangkan pemerintah, kini ternyata ada program bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha kecil.

Konsep DAFEP yang ia terima pada saat pertemuan-pertemuan dan juga diperoleh dari KIPPK Magelang ia terapkan dalam mengelola UPKG yang ia ketuai. Menurutnya, agar 9 kelompok yang ada di UPKG desa Deyangan dapat berjalan secara baik dapat bekerjasama dengan baik dan tidak saling silang pendapat kuncinya adalah komunikasi. Artinya, segala sesuatu yang akan dilaksanakan di DAFEP terutama di UPKG dibicarakan secara bersama-sama dengan wakil-wakil dari kelompok-kelompok tersebut. Tandasnya, bila akan melaksanakan kegiatan kelompok-kelompok tani diundang diajak bersama-sama untuk membicarakan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang bermanfaat untuk UPKG-nya. Pertemuan dilaksanakan berdasar pada kebutuha

Bisa saja pertemuan dilaksanakan sebanyak 2 – 3 kali dalam satu bulan. Dalam hal memanaj informasi, bila sifat informasi itu sangat penting dan harus segera sampai kepada anggota-anggota UPKH, ia melakukannya dengan mendatangi masing-masing ketua kelompoknya.

Program

Untuk mewujudkan UPKG yang berhasil, telah disusun program bersama pengurusnya. Melanjutkan dan mengembangkan program yang sudah ada tahun 2002. Disamping itu program tindak lanjutnya. Salah satunya UPKG yang akan menampung usaha-usaha anggotanya dan mencari pasar. Itu merupakan salah satu terobosan yang dilakukan di UPKG desa Deyangan. Karena pemasaran hasil merupakan kendala yang dihadapi oleh sebagian besar usaha-usaha anggota UPKG. Program lainnya, yaitu UPKG akan membantu pencarian dana.

Program pengembangan usaha lainnya berdasar hasil sarasehan petani yang dilaksanakan di kabupaten, UPKG melihat peluang yang menguntungkan, yaitu usaha melon. Karena usaha dibidang melon ini sudah ada yang siap untuk membiayai dan juga siap untuk membeli hasilnya. Katanya, baru ada satu kelompok yang sudah melaksanakan budidaya melon. Berdasar pada peluang tadi, UPKG desa Deyangan akan mengembangkan budidaya melon kepada kelompoknya (9 kelompok). Tuturnya, seandainya 9 kelompok yang ada di UPKG desa Deyangan berusaha budidaya melon hasilnya tak akan mencukupi kebutuhan pembeli (*buyer*) karena pihak pembeli membutuh-

kan kurang lebih 300 – 400 ton perbulan. Tentang teknologi budidayanya akan dilaksanakan pelatihan budidaya melon oleh pembeli (buyer) tadi.

Proses pelaksanaan kegiatan

Mulanya ada kesulitan untuk mengumpulkan peserta yang benar-benar siap melaksanakan PRA. Dengan perencanaan partisipatif masyarakat setidaknya diikuti sertakan untuk sebuah perencanaan kegiatan. Dari kegiatan seperti ini peserta PRA akan mengetahui potensi, kondisi dan masalah yang ada di wilayahnya. Menurutnya, secara garis besar peserta tahu tujuan dilaksanakan PRA dan ternyata mereka mampu menggali potensi, kondisi dan masalah yang ada di wilayahnya. Kemampuan masyarakat di desa Deyangan, kecamatan Mertayudan, kabupaten Magelang setelah mempelajari dan menganalisis instrumen-instrumen PRA ternyata mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki wilayahnya. Misalnya, telah dikembangkan pengolahan dodol yang bahan bakunya pepaya. Karena pepaya tumbuh dengan subur di desa Deyangan.

Instrumen-instrumen PRA mereka gunakan sesuai dengan keperluannya. Apa yang diusahakan dan dikelola kelompok tentunya berdasar potensi yang ada di wilayah tersebut. Sunarto, sebagai ketua UPKG menuturkan untuk menjawab bagaimana caranya agar usaha kelompok

bisa berhasil bisa dilihat dari diagram kelembagaan (diagram Venn). Dari diagram kelembagaan ini kita dapat melihat keterkaitannya dengan lembaga atau instansi lain dan juga dapat dimintakan bantuan teknisnya pada lembaga tersebut. Menurutnya, permasalahan yang ada pada kelompok yaitu kurangnya modal usaha. Namun, ia masih ingat apa yang diucapkan oleh pelatih bahwa kurangnya permodalan bukan masalah utama, yang menjadi masalah utama adalah membenahi sumberdaya manusianya.

Ada yang menarik dari UPKG ini, yakni bagi peserta yang sudah mengikuti pelatihan diberi tugas untuk memberikan informasi apa yang mereka peroleh dari pelatihan kepada anggota atau kepada masyarakat di sekitarnya. 1 orang peserta minimal 2 orang. Menurutnya, kami percaya hal ini sudah ada yang melaksanakan tugas karena buktinya ada yang ikut pelatihan menanam cabe dan masyarakat disekitarnya banyak yang menanam cabe dan bertanya kepada yang sudah mengikuti pelatihan menanam cabe.

Tentang harapannya kalau memang ada pelatihan yang memerlukan tindak lanjut, lakukanlah tindak lanjut yang berkesinambungan agar pelatihan-pelatihan yang diperoleh tidak terputus. Demikian tutur Sunarto sebagai ketua UPKG desa Deyangan yang mempunyai motto lakukan saja apa yang bisa dilakukan sebaik-baiknya. (ds)

Bekerja adalah aktivitas dinamis yang kegiatannya penuh tantangan, tidak monoton tapi fleksibel, mampu mengikuti perkembangan dan selalu berupaya mencari terobosan-terobosan baru.

DAFEP DI MATA PENYULUH

Daerah binaan terbilang luas, ada 20 desa ditambah 4 kelurahan. Itu yang dibima Akostan Bire Lawa. Namun belakangan Kostan, begitu teman sejawat memanggilnya sehari-hari hanya membina 6 desa di lokasi DAFEP ditambah 1 desa non DAFEP. Banyak cerita dari Akostan, mulai dari pola kebijakan penyuluhan semasa Orde Baru yang sentralisir sampai era Reformasi yang konon katanya lebih demokratis.



Akostan Bire Lawa, tetap konsisten dengan profesinya sebagai penyuluh.

Akostan yang mengantongi jam terbang sebagai penyuluh lebih dari sebelas tahun, sampai sekarang konsisten dengan profesinya sebagai penyuluh. Karirnya diawali sebagai penyuluh lapangan di BPP Tesbatan yang pada waktu itu masih membawahi 20 desa dan 4 kelurahan. Sebagai penyuluh lapangan ia harus membina dari satu desa ke desa yang lain dengan jarak tempuh yang relatif jauh tanpa menggunakan alat transportasi lapangan yang memadai. Meski demikian tidak menyurutkan dirinya dalam memberikan penyuluhan kepada petani di daerah binaannya.

Pola penyuluhan pada waktu itu, karenanya masih merupakan pola “Laku”, yaitu pola latihan dan kunjungan dengan pendekatan top-down. Setiap kebijakan selalu mengalir dari atas ke bawah, ibarat garis komando yang harus dilaksanakan oleh petugas di tingkat lapangan. “Ya... kita harus loyal,” katanya lirih. “Dan petani pun hanya dapat menerima, entah itu dibutuhkan atau tidak,” tambahnya.

Kini pola semacam itu sudah ditinggalkan sejak bangsa ini rame-rame mengusung keterbukaan seiring berhembusnya iklim reformasi pasca runtuhnya Orde Baru. Dan pada saat bersamaan DAFEP pun diluncurkan dengan seperangkat konsep pemberdayaan petani. Seiring dengan itu, pada tatanan kekuasaan politik terbit pula UU No. 20 & 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang mengalihkan sebagian besar kewenangan ke tangan otoritas daerah.

Tak ayal lagi DAFEP pun cepat diterima oleh petani. Dalam waktu yang relatif singkat masyarakat tani mulai mengenal potensi yang dimilikinya, seperti potensi usaha tani keluarga, potensi sumberdaya alam di lingkungan desanya termasuk potensi usahatani yang digeluti oleh masing-masing keluarga tani. Potensi yang selama ini tidak pernah dipahami dan diketahui secara jelas oleh petani, justeru diajarkan secara komprehensif oleh DAFEP melalui proses PRA. “Setelah mengikuti proses PRA, petani kini dapat memilih usahatani yang menurutnya paling menguntungkan. Itulah sebabnya setiap kali ada pembelajaran PRA, petani selalu mengikutinya dengan penuh perhatian”, ujar Akostan mengungkapkan pengalamannya ketika pertama kali memberikan bimbingan proses penyusunan PRA di Desa Tesbatan. Awalnya memang sulit ditambahnya, sikap apriori akibat pengalaman yang lalu kadang menghambat proses pemahaman PRA. Lagi pula petani tidak terbiasa melakukan aktivitas tulis menulis. Oleh karena itu metoda pembelajarannya dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan komunikasi dua arah, agar petani dapat menyampaikan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya masing-masing.

Cerita lain dari Akostan mengenai DAFEP adalah bagaimana petani sekarang sudah bisa menyusun perencanaan, mulai dari penyusunan Rencana Usaha Keluarga (RUK), Rencana Kegiatan Kelompok (RKK) sampai dengan Rencana Kegiatan Desa (RKD) dan Rencana Penyuluhan Kecamatan (RKPD). “Sehingga pengertian FMA pun lambat tapi pasti dapat dimengerti oleh petani”, jelas Akos-

tan yang kini tengah menyelesaikan S1-nya di Universitas Nusa Cendana.

Begitupun UPKG yang mengorganisir beberapa kegiatan FMA di desa-desa DAFEP, Kecamatan Amarasi aktif melakukan kegiatan pembelajaran antar sesama petani yang dipandu oleh seorang petani pemandu berpengalaman dalam berusaha tani. Kegiatan pembelajaran ini mendapat bantuan dana LOAN 100% dari Bank Dunia. Dana tersebut baru dapat dicairkan setelah terlebih dahulu mengajukan proposal kegiatan yang berisikan rincian kegiatan, termasuk besaran pembiayaannya. Setelah proposal tersebut ditandatangani oleh ketua UPKG, diajukan kepada Tim FET di tingkat BPP untuk mendapat verifikasi akan keabsahan prosedur teknis, lalu mendapat pula persetujuan dari pemimpin proyek yang meneliti kebenaran aspek teknis administrasi keuangan. Setelah prosedur tadi selesai, baru diajukan kepada KPKN setempat untuk diterbitkan SPM yang masuk ke dalam rekening ketua UPKG.

“Pekerjaan seperti ini sungguh sangat melelahkan bagi petani kebanyakan”, jelas Akostan yang telah menjadi koordinator BPP selama sembilan tahun di BPP yang sama. Ditambahkan bahwa mencatat bagi kebanyakan petani merupakan pekerjaan yang berat. Inilah salah satu kendala yang sedikit sulit untuk merubahnya karena memerlukan waktu yang relatif lama dan harus ditekuni dengan melibatkan anggota keluarga lain yang lebih muda yang masih duduk di bangku sekolah. Akostan menambahkan bahwa bagaimana mungkin petani mampu menyusun proposal untuk kegiatan FMA sementara dirinya tidak mempunyai minat dengan urus-

an catat mencatat. Tidak hanya itu, kebiasaan mencatatpun dapat sangat bermanfaat untuk kegiatan usahatani, seperti mencatat berapa biaya yang diperlukan untuk pengolahan lahan, penyediaan bibit, pupuk dan obat-obatan. Lalu setelah itu, berapa harga jual hasil panen yang dapat dikumpulkan. Baru setelah itu dapat diketahui apakah usahataniya menguntungkan atau tidak, setelah sebelumnya dibandingkan antara biaya pengolahan (input produksi) dengan hasil penjualan (output). “Inilah keuntungan-keuntungan bila petani dapat membiasakan diri mencatat seluruh kegiatan usaha taninya”, ujar koordinator penyuluh yang telah dikarunia 3 orang anak dari istri tercinta Martha Ratu Ledo yang juga seorang penyuluh.

Kegigihan tim FET di BPP Tesbatan yang dikoordinir oleh Akostan bersamasama dengan petani pemandu, 6 desa yang menjadi binaannya kini telah membuah hasil yang cukup dari lumayan. Para petani di 6 desa tersebut tidak pernah sepi dari kegiatan berusaha tani. Boleh dikata semuanya sibuk, perekonomian desapun terus berputar. Setiap hari ada saja hasil tani yang dibawa ke pasar yang kebetulan tidak jauh dari lokasi ke 6 desa tersebut. Pasar Oesao, begitu pasar itu disebutnya hampir seluruh hasil tani di pasar itu didominasi oleh hasil tani dari ke 6 desa DAFEP, mulai dari sayuran sampai

dengan ternak dan hasil tanaman keras lainnya seperti kelapa, gula merah, asam gunung dan sebagainya.

Dampak lain yang timbul setelah DAFEP berhasil memberdayakan para petani dibawah binaan BPP Tesbatan adalah hasil perkebunan yang ditanam sebagai tanaman sela, seperti kakao, vanili, jambu mete, pemasarannya kini telah diantarpulauan dengan harga jual tentu lebih mahal dibanding dijual di tempat. Jaringan pemasaran seperti ini merupakan hasil upaya kerjasama kemitraan yang difasilitasi oleh Tim FET BPP Tesbatan dengan salah satu perusahaan swasta dan BPPT-Naibonat.

Keberhasilan demi keberhasilan telah dibukukan oleh petani di 6 UPKG di Kecamatan Amarasi yang tentu saja tidak terlepas dari peran Tim FET dan segenap jajarannya, termasuk dukungan penuh dari Sub Dinas Pertanian Kabupaten Kupang. Kendati demikian, ternyata masih menyisakan harapan kalau tidak dikatakan obsesi bagi seorang Akostan yang telah mengakrabi kehidupan petani di wilayahnya tidak kurang dari sebelas tahun lamanya itu, yaitu agar program DAFEP dapat terus dilanjutkan oleh Pemerintahan Daerah meski konon Proyek DAFEP akan segera berakhir pada tahun 2004.

Semoga! (r_one)

6 (ENAM) CIRI ORANG PRODUKTIF :

1. Memiliki rasa cinta terhadap pekerjaannya.
2. Memiliki rasa tanggung jawab.
3. Mempunyai pandangan ke depan.
4. Selalu mencari perbaikan-perbaikan.
5. Selalu meningkatkan diri.
6. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah.

TITISAN KARTINI DARI TANAH TIMOR

(Perspektif Gender : sebuah pengalaman)

Kinginan untuk memajukan sesama perempuan menjadi obsesinya sejak lama setelah menyaksikan bagaimana perempuan-perempuan di lingkungannya hampir tidak mempunyai akses sedikitpun dalam pengambilan keputusan terhadap usahatani keluarga mereka. Umumnya mereka melakukan disamping pekerjaan rumah tangga, juga pekerjaan di sawah dan ladang yang menjadi penghasilan utama keluarganya. Beban pekerjaannya pun terbilang berat atau paling tidak sama dengan para suami mereka.

Kondisi buruk seperti ini yang menurut Magdalena Riwu, begitu sebutan nama lengkapnya sungguh tidak seimbang. "Idealnya perempuan justeru harus banyak berperan", katanya lantang. Itulah sebabnya ia melakukan berbagai upaya pemberdayaan perempuan lewat kegiatan kursus-kursus keterampilan. Di kelompok tani OMEGA misalnya, Magdalena menyelenggarakan berbagai keterampilan dan kursus bagi kelompoknya yang kebanyakan ibu-ibu rumah tangga. Keterampilan yang banyak diminati diantaranya menjahit, membuat kue dan pemeliharaan ayam buras.

Upaya yang tidak kenal lelah dalam memperjuangkan kaumnya, Magdalena pun ikut aktif didalam kepengurusan UPKG Naibonat. Berbagai saran dan ide



Magdalena Riwu, ingin memberdayakan kaum perempuan.

tentang kedudukan dan peranan perempuan dalam keluarga ia sampaikan dalam setiap kesempatan pertemuan pengurus UPKG. Meski hasilnya belum memuaskan betul, paling tidak aspirasi yang disampaikannya itu telah terakomodir meski masih terbilang sedikit. Buktinya setiap kali ada pelatihan, kaum ibu selalu dilibatkan sebagai peserta. Lihat saja sekarang, peserta perempuan sudah ada kan, katanya di sela-sela pelatihan Manajemen Ternak yang dilaksanakan di BPP Naibonat baru-baru ini.

Konsep DAFEP yang dinilainya memberikan peluang bagi perempuan untuk berkiprah, menjadikan Magdalena lebih bersemangat untuk mengajak kaumnya terlibat dalam usahatani keluarga. Upaya itu ia buktikan dengan menjalin kerjasama dengan BPPT dalam pemasaran bibit jagung. Dalam kerjasama tersebut disepakati ia dan kelompoknya sebagai penangkar bibit, sementara BPPT menyediakan bibit dan bimbingan teknis budidaya jagung. Setiap anggota kelompok diberikan bibit jagung 1 sampai dengan 5 kg tergantung luas lahan yang diolah petani. Untuk 5 kg bibit dapat ditanam untuk 0,5 ha yang dapat menghasilkan 1 ton jagung kering pipil dengan harga jual Rp. 1.275,- per kg. Nah, tinggal berapa keuntungan yang dapat dikantongi petani. Sementara petani hanya mengembalikan Rp. 10.000,- untuk setiap kilogram jagung bibit yang diambilnya.

Kemitraan semacam itu tidak terlepas dari kolaborasi yang dijalin Proyek DAFEP yang tidak sebatas kerjasama teknis semata, tapi dapat melebar ke

wilayah pemasaran yang saling menguntungkan. Dan melihat kenyataan ini, para suaminya kini tengah mengalami perubahan sikap terhadap kaum perempuan yang tidak lagi memposisikan perempuan sebagai anggota keluarga yang tidak memiliki hak mengambil keputusan dalam menentukan usahatani keluarga. “Suara kami sekarang sudah didengar dan kami pun dapat menentukan apa yang harus diputuskan”, ujar Magdalena tersenyum menyiratkan kepuasannya.

Dalam waktu dekat ia dan kelompoknya akan mendapat dana bergulir dari Pemda Kabupaten Kupang yang disalurkan lewat kecamatan untuk membiayai usaha tani sayuran dan ternak kecil, seperti ayam buras dan ternak lainnya. “Tidak besar jumlahnya, tapi cukup untuk menggairahkan roda perekonomian pedesaan”, jelas Magdalena yang bersuamikan Mikael Riwu yang telah dikaruniai 3 anak ini. Akankah semangat Magdalena terus berkobar seperti halnya semangat Kartini dalam membela kaumnya yang terbelakang. Semoga saja (r_one)

CARA PANDANG YANG TIDAK PRODUKTIF

- Menganggap bahwa tanpa bekerja (keras) kita dapat memperoleh sesuatu yang berharga.
- Ketakutan mengambil keputusan karena ada unsur resiko.
- Merasa puas karena hasilnya dianggap “cukup baik” meskipun belum mencapai memuaskan.
- Meng-ia-kan tindakan yang dianggap salah sampai “esok” dan bukan mengoreksinya “sekarang”.

PESTISIDA ALAMI

UPKG Kebonagung, Imogiri, Bantul

Dewasa ini ada kecenderungan bahwa negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan negara Eropa Barat telah menggalakkan atau mengkomsumsi produk-produk pertanian yang ramah lingkungan. Negara-negara tersebut mau menerima atau mengimpor produk pertanian yang ramah lingkungan. Indonesia yang merupakan salah satu negara pengekspor produk-produk pertanian, harus bisa menyesuaikan dengan permintaan pasar yang ada.

Pada sisi lain, harga obat-obatan atau pestisida terus meningkat. Hal ini salah satunya akan menyebabkan daya beli petani terhadap pestisida tersebut semakin lemah. Kalaupun bisa terbeli maka akan sangat berpengaruh terhadap biaya produksi yang selanjutnya bisa berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh. Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut maka perlu dipikirkan adanya penggunaan pestisida yang ramah lingkungan atau bebas dari zat-zat kimia.

Unit Pengelola Kegiatan Gabungan (UPKG) Kebonagung, Imogiri, Bantul, Yogyakarta yang merupakan salah satu UPKG binaan DAFEP, telah mencoba mengemas atau merakit pestisida yang ramah lingkungan atau pestisida alami. Dalam salah satu kegiatan pelatihan UPKG tersebut telah memperkenalkan atau mengajarkan pada para anggotanya untuk belajar tentang pestisida alami tersebut.

Ada tiga macam pestisida alami yang diberikan dalam proses pembelajaran yaitu meliputi pestisida nabati Kakagung, pestisida nabati dan pestisida hayati dari jamur *Berveria Basiana*. Nah, dari bahan dan alat apa pestisida tersebut dibuat, bagaimana cara membuat, dan aplikasinya serta manfaatnya. Berikut sajian secara singkat ketiga pestisida alami yang dihasilkan oleh UPKG Kebonagung, Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

PESTISIDA NABATI : KAKAGUNG

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan untuk pembuatan pestisida nabati kakagung meliputi daun dadap serep 95 lembar, daun kelor $\frac{1}{4}$ kg, daun kleresede $\frac{1}{4}$ kg, daun lamtorogung $\frac{1}{4}$ kg, air 10 liter dan air kencing sapi 1 liter. Sementara itu peralatan yang digunakan meliputi lumpang, alu, ember, saringan, galon, torong, gelas ukur dan botol bekas aqua.

Cara dan penggunaan

Cara :

- Tumbuk bahan-bahan dari daun-daunan sampai halus.
- Berikan air secukupnya, kemudian saring sampai bersih.
- Campurkan sisa air tersebut bersama air kencing sapi.

- Masukkan air tersebut kedalam botol aqua.
- Lakukan fermentasi selama 3 hari.
- Pestisida nabati siap untuk digunakan.

Penggunaan :

- Ambil larutan kakagung sebanyak 150-200 cc.
- Campurkan air biasa sebanyak 14-15 liter (untuk 1 tangki semprot).
- Semprotkan pada waktu sore hari.
- Untuk tanaman padi pada umur 21 hari, 30 hari, 40 hari.
- Untuk tanaman palawija pada umur 25 hari, 28 hari, 35 hari.

Manfaat :

Pestisida nabati kakagung mempunyai beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai penyubur tanaman padi, palawija, sayuran dan buah-buahan. Selain itu juga bisa digunakan sebagai pengendali hama seperti ulat, walang, trip, aphid dan lalat bibit.

PESTISIDA NABATI

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pestisida nabati meliputi laos $\pm 1/4$ kg, jahe $\pm 1/4$ kg, daun wedusan $1/4$ kg, daun getasan $1/4$ kg, daun johar $1/4$ kg, bawang putih $1/2$ ons dan air 5 liter. Sementara itu peralatan yang digunakan meliputi lumpang, alu, ember, saringan, galon, torong, gelas ukur dan botol/jrigen.

Cara dan Penggunaan

Cara :

- Tumbuk bahan-bahan yang digunakan sampai halus.

- Berikan air secukupnya atau ± 5 liter.
- Diamkan atau fermentasikan selama 2 hari 2 malam.
- Saring sampai bersih hasil dari fermentasi.
- Kemas dalam botol atau jerigen.
- Pestisida nabati siap untuk digunakan.

Penggunaan :

- Ambil larutan pestisida yang siap digunakan sebanyak 150 cc.
- Tambahkan air 14-15 liter (satu sangki semprot).
- Lakukan penyemprotan pada sore hari.
- Untuk tanaman padi umur 20 hari, 28 hari, 30 hari.
- Untuk tanaman palawija umur 20 hari, 27 hari, 35 hari.

Manfaat :

Beberapa manfaat dari pestisida nabati ini diantaranya adalah untuk pengendalian hama, lalat dan serangga seperti Trip, Aphid dan Huto

PESTISIDA HAYATI (jamur *Berberia Basiana*)

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam pembuatan pestisida hayati ini meliputi beras dan starter benih jamur *Berberia Basiana*. Sementara itu peralatan yang digunakan meliputi soblok, entong, talam, kipas, kompor, incase, Bunser (senter spritus). Jarum N, kantong plastik ukuran 0,5 x 12 x 20, gunting, steples dan isinya, isolasi, rege plastik, korek api, alkohol 70%, spirtus, tisu dan kapas.

Caranya :

- Cucilah beras kemudian rendam dengan air panas \pm 10 menit.
- Masukkan ke soblok dan masak sampai $\frac{1}{2}$ matang.
- Letakkan pada talam dengan entong yang telah disterilisasi dengan alkohol 70% dan angin-anginkan sampai dingin.
- Setelah dingin masukkan dalam kantong plastik \pm $\frac{1}{3}$ kantong terus digulung dan diisolasi.
- Sterilisasikan dengan cara dikukus dalam sblok selama $1\frac{1}{2}$ - 2 jam.
- Angkat dan angin-anginkan sampai dingin.
- Nasi yang sudah dingin masukkan ke dalam incase nasi.
- Nasi yang dalam incase, ambil satu persatu bungkus untuk siap dibibiti.
- Lepas isolasi dan tekan-tekan nasi agar merata dan siap dibibiti dengan stater

menekan jarum yang sebelumnya dipanaskan dengan bunser.

- Lipat dan tutup dengan klip terus susun pada rege pastik.
- Pestisida hayati jamur *Berberia Basiana* ini siap diaplikasikan setelah 21-30 hari.
- Jangan lupa peralatan dan petugas yang akan mengerjakan sebelumnya disterilisasi dengan alkohol 70%.

Manfaat :

Salah satu manfaat dari pestisida hayati jamur *Berveria Bariana* adalah untuk pengendalian walang sengit.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Sarinah M Aryanto, PPL pendamping DAFEP desa Kebonagung atau BIPP Bantul, Yogyakarta. Selamat Mencoba. (Sumber : *UPKG Kebonagung, Imogiri, Bantul; bgn*)

PELATIHAN PETANI UNTUK PEMBERDAYAAN PETANI DALAM KONSEP DAFE-P

Kegiatan FMA (*Farmers Manage Activity*) dalam DAFEP saat ini sudah bergulir pada putaran yang kedua kali. Namun demikian masih banyak dijumpai banyak proposal kegiatan pelatihan petani dalam FMA yang masih menyimpang dari kaidah-kaidah pelatihan petani yang dirancang sebagai sarana pemberdayaan petani dalam konsep DAFEP.

Sebagai contoh : a) Ada SL (Sekolah Lapangan) X yang prosesnya hanya 3 hari, ada yang 7 hari; b) Ada kursus-kursus petani yang hanya 1 hari untuk setiap jenis pelatihannya; c). Ada kegiatan magang yang isi kegiatannya hanya berupa kegiatan peninjauan lapangan dan wawancara saja, dll. Selain itu, dari aspek metodologi pelatihan masih banyak digunakan

pendekatan dan metode-metode konvensional, seperti ceramah, demonstrasi yang diberikan oleh Penyuluh dan atau Petugas Dinas yang bersangkutan.

Upaya-upaya pelurusan pelaksanaan pelatihan petani dalam rangka pelaksanaan Proyek DAFEP perlu dilakukan tidak cukup hanya berorientasi untuk memenuhi rekomendasi hasil penilaian Bank Dunia pada MTR yang lalu. Mengingat saat ini merupakan tahun terakhir masa proyek DAFEP, maka upaya dan tindakan pelurusan terhadap pelatihan harus sudah berorientasi kepada tujuan akhir dan dampak dari proyek.

Fungsi pelatihan petani untuk pemberdayaan petani dalam konsep Dafep

Tujuan akhir atau cita-cita yang terkandung dalam konsep DAFE-(P) ialah

mewujudkan petani sebagai warga negara terhormat yang bebas, merdeka dan menjadi subyek pembangunan yang mandiri, dinamis, kreatif, berkemampuan (ahli di bidangnya), berorientasi ke depan dan memiliki daya saing yang tinggi dalam berusahatani.

Tujuan atau cita-cita tersebut di atas merupakan suatu pembalikan kondisi yang sangat mendasar dari kondisi nyata yang dialami petani selama ini. Saat ini masyarakat petani masih tergolong sebagai lapisan terbawah dalam kelas sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pertanian Indonesia didominasi oleh usaha skala kecil yang dilaksanakan oleh 21.605.000 rumah tangga petani, 87% berpendidikan SD ke bawah, berlahan sempit, bermodal kecil dan produktivitas rendah (Sensus Pertanian 1993). Produktivitas tenaga kerja pertanian diukur berdasarkan penda



patan rata-rata hanya mencapai Rp. 2,33 juta/tahun, sedangkan pendapatan tenaga kerja di sektor manufaktur rata-rata mencapai Rp. 12,55 juta/tahun (BPS-1996).

Upaya pembalikan situasi yang dicita-citakan DAFE-(P) di atas hanya dapat dicapai melalui pemberdayaan petani, yakni dengan cara memberikan/menggulirkan kekuasaan kepada para petani berupa : a). Kekuasaan terhadap peran (*role power*), b). Kekuasaan terhadap keahlian (*expert – power*), dan c). Kekuasaan terhadap sumberdaya (*resource power*). Upaya ke arah ini merupakan upaya yang tidak mudah, sebab pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat (petani) sama halnya dengan pembalikan budaya. Dalam sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda selama 3,5 abad dan penjajahan Jepang selama 3,5 tahun. Apa yang dinamakan kekuasaan itu tidak pernah ada ditangan rakyat. Demikian pula halnya pada jaman kemerdekaan, jaman orde lama dan orde baru hingga ke ke jaman reformasi sekarang ini, apa yang dinamakan kekuasaan itu tidak pernah benar-benar ada di tangan rakyat, tetapi menjadi milik birokrasi pemerintahan, sehingga para pejabat pemerintah sering disebut sebagai penguasa (Ingat : Gubernur, Bupati, Camat, Lurah/ Kepala Desa dulu disebut sebagai penguasa tunggal di wilayahnya).

Pemberdayaan sebagai upaya pembalikan budaya tidak akan dapat bergulir mulus tanpa melalui proses pendidikan masyarakatnya, karena budaya merupakan produk dari proses pendidikan masyarakatnya. Demikian pula halnya dengan pemberdayaan petani, konsep DAFE-(P)

mencoba memproses upaya pemberdayaan petani ini melalui jalur pendidikan masyarakat taninya, yakni melalui desentralisasi penyuluhan pertanian dan kehutanan. Desentralisasi adalah proses menggulirkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan juga mengandung pengertian yang lebih dalam yakni menggulirkan kewenangan itu dari aparat kepada masyarakat. Itulah makna terdalam dari desentralisasi dalam konsep DAFE-(P). Dengan demikian DAFE-(P) mendudukan Desentralisasi dan Pemberdayaan sebagai 2 (dua) sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kewenangan dan kekuasaan, kedua-duanya harus digulirkan menjadi milik petani agar mereka benar-benar mampu menjadi subjek pembangunan.

Pelatihan petani merupakan unsur terpenting dalam proses pendidikan petani (baca: penyuluhan), karena didalam konsep DAFE-(P), pelatihan petani merupakan tindakan stimulasi kepada petani untuk menggugah dan membangun kemampuan kognisi, afeksi dan psikomotor serta aspek konasi petani agar tergerak bangkit menjadi manusia pembelajar, dan secara komunitas akan terbangun menjadi masyarakat pembelajar. Hal inipun merupakan upaya pembalikan budaya, karena selama ini pendekatan proses belajar masyarakat dilakukan tidak untuk menjadi masyarakat pembelajar tetapi untuk menjadi masyarakat pembeo, yakni masyarakat yang tunduk kepada petunjuk-petunjuk, taat pada perintah dan patuh kepada Pemerintah. Begitulah Warga Negara yang baik dipersepsikan selama ini.



Dalam dunia pendidikan, dari sekian banyak teori pendidikan, dikenal ada 2 (dua) teori pendidikan yang berbeda kutub atau bersebrangan. Yang pertama dan paling tua adalah teori pendidikan *kewarga-negaraan*, yakni teori yang berorientasi untuk mendidik manusia (masyarakat) menjadi warga negara yang baik. Teori ini berpendapat bahwa warga negara yang baik ditentukan oleh komunitas yang baik ketimbang individu. Sebaliknya, teori kedua merupakan antitesis dari teori pertama, yakni teori pendidikan pembebasan individu, yang berpendapat bahwa individu-individu yang baik akan dapat membangun dan mewujudkan warga negara yang baik, malah membangun warga dunia yang baik. Teori pembebasan

individu berorientasi kepada penyediaan peluang bagi pertumbuhan melalui pembentukan pribadi yang utuh, bebas, merdeka, mandiri dan kreatif serta menyingkirkan pengaruh-pengaruh yang merintanginya. Sebaliknya teori kewarganegaraan berorientasi pada ketaatan, kepatuhan dan ketundukkan kepada norma-norma kemasyarakatan dan kegyuban.

Kita tidak hendak mempertentangkan kedua teori pendidikan di atas, namun tampaknya apa yang menjadi cita-cita dan tujuan akhir DAFE-(P) lebih merujuk pada teori pembebasan individu. Sementara perjalanan panjang sejarah pendidikan masyarakat di Indonesia sejak jaman penjajahan hingga sekarang ini menganut pendidikan kewarganegaraan, jadi sekali

lagi kita melihat bahwa DAFE-(P) secara konseptual melakukan pembalikan dalam sistem pendidikan masyarakat (baca : penyuluhan). Telaahan teoritis singkat dalam aspek pendidikan ini dimaksudkan untuk dapat lebih memahami konsep DAFE-(P) secara lebih mendalam, agar mampu membimbing kita dalam mengimplementasikannya di tingkat lapangan.

Pelatihan petani dalam konsep DAFE-(P) dimaksudkan sebagai metodologi untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Dalam bahasa keproyekan, pelatihan petani dalam DAFEP adalah sarana atau wahana kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan akhir proyek. Masalahnya, pelatihan petani yang bagaimana yang dikonsepsikan oleh DAFE-(P) sebagai metode untuk mencapai tujuan tersebut dan bagaimana hal itu didesain sebagai sebuah kegiatan Proyek.

Secara teknis metodologis, model pelatihan petani yang dipilih dan diterapkan dalam DAFE-(P) harus searah dan sejalan dengan metode-metode pembebasan individu dan menyingkirkan pengaruh-pengaruh yang merintangai pembebasan itu. Metode-metode tersebut adalah metode-metode pelatihan yang menerapkan prinsip-prinsip pembebasan dan pemberdayaan secara taat azas, antara lain prinsip : *discovery learning (inovative learning)*, *learning by doing*, *experiential learning cycle*, belajar dalam situasi nyata, petani belajar dari petani, dll. Model pelatihan petani dan pembelajaran petani yang telah kita kenal, antara lain : Sekolah Lapangan, Magang, Studi Petani, Kaji Terap di lahan petani, dll.

Secara keproyekan, maka manajemen keproyekan DAFEP harus mampu men-

desain dan memilih bentuk-bentuk kegiatan pengawalan, pembimbingan dan fasilitasi kegiatan penerapan model pelatihan petani secara tepat dan cermat, agar para pelaku dan pelaksana kegiatan dapat melaksanakannya secara taat azas. Dalam implementasinya di tingkat lapangan, masih banyak dijumpai pemilihan dan penerapan model-model pelatihan petani seperti yang disebutkan di atas yang dilakukan secara tidak taat azas. Yang dimaksud dengan ketataazasan disini ialah konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip pembebasan dan prinsip-prinsip pemberdayaan secara konsekuen.

Pembebasan Individu, Desentralisasi dan Pemberdayaan Petani yang menjadi tujuan akhir DAFE-(P) akan sangat tergantung dari kualitas pelaksanaan kegiatan (a.l. tercapainya indikator kualitatif pelatihan petani ini). Kualitas akan sangat bergantung pada ketataazasan penerapan prinsip-prinsip dalam aspek teknis metodologis pada setiap pelaksanaan kegiatan. Ketaat-azasan, akan sangat bergantung pada 2 (dua) hal pokok, yakni : a). Tingkat pemahaman, kebecusan motivasi dan komitmen para fasilitator (Petugas teknis, penyuluh, pelaksana proyek), dan b). Transparansi dalam manajemen sebagai prasyarat utama bagi desentralisasi dan penumbuhan partisipasi.

Kendala

1. Banyak kendala dalam upaya mewujudkan Desentralisasi dan Pemberdayaan Masyarakat (Petani) melalui pendekatan pembebasan individu dan pendekatan partisipatif di negeri tercinta ini. Sebagaimana telah diuraikan

di atas, semua upaya ke arah itu merupakan tindakan pembalikan dari *excisting condition* yang telah berlangsung selama berabad-abad. Karenanya tidak heran kalau akan banyak dijumpai kendala dan hambatan yang merintangai upaya-upaya tersebut. Secara sederhana berbagai kendala tersebut dapat digolongkan pada 2 kluster, yakni a). Kendala Kultur (Budaya), b). Kendala Struktur.

2. a). *Kendala Kultur (Budaya)*; Sebagaimana telah diuraikan di atas, pendekatan teori pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia sejak jaman Belanda hingga sekarang, tidak memberi peluang dan keleluasaan kepada individu untuk berkembang di luar norma yang berlaku. Padahal mana mungkin kreatifitas akan tumbuh bila ia tidak keluar dari sesuatu yang sudah dianggap baku atau mapan. Selain itu, pendekatan pendidikan kewarganegaraan sangat rentan untuk diintervensi dan dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan penguasa atau pemerintahan yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Hal ini pula yang dialami oleh masyarakat Indonesia sejak jaman Belanda, hingga Orde Baru dan Orde Reformasi sekarang ini.
3. *Budaya Paternalistik dan Feodalistik* pada masyarakat kita yang telah tertanam lama merupakan kendala bagi upaya penumbuhan jiwa kemandirian. Paternalistik dan Feodalistik baik secara langsung maupun tidak langsung menciptakan ketergantungan dan inferioritas pada lapisan bawah dan menengah. Kondisi ini sangat tidak kon-

disif untuk pengembangan kemandirian.

4. *Masyarakat Lemah Karsa dan Mental Instant*; Tekanan-tekanan yang teramat berat sejak jaman penjajahan kepada masyarakat lapisan bawah, baik yang dilakukan para penjajah maupun para bangsawan pribumi, politik *divide et impera*, tanam paksa, kerja rodi di jaman dulu, Tapol dan OT masa Orde Baru, telah menciptakan masyarakat kehilangan idealisme dan daya kejuangannya. Penguasaan dan pengambilan peranan pemerintah yang berlebihan dalam pembangunan selama ini, telah menumbuhkan mental instant di kalangan masyarakat, mental terima jadi. Fenomena ini tumbuh karena Pemerintah tidak melibatkan dan mendudukan masyarakat sebagai subjek pembangunan, tetapi sebagai objek. Kelimpahan dana pembangunan dan dana pinjaman di masa lampau telah digunakan untuk menina-bobokan masyarakat bagi kepentingan politik pemerintah saat itu dengan proyek-proyek sinterklas bantuan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat hanya terima jadi, lama kelamaan masyarakat terbiasa untuk menerima bantuan dan terciptalah jiwa ketergantungan. Selain itu, intervensi pembangunan oleh Pemerintah telah banyak membunuh budaya prakarsa dan swadaya masyarakat yang dahulu tumbuh berbasiskan jiwa gotong-royongnya.
5. b). *Kendala Struktur*; Menurut pendapat saya, kendala utama penerapan azas pemberdayaan, desentralisasi, pembebasan individu dan partisipasi

adalah unsur birokrasi. Birokrasi menuntut adanya penjenjangan otoritas terstruktur secara hierarkhis, hal ini sangat bertolak belakang dengan azas partisipatif yang menuntut adanya kesetaraan. Birokrasi menuntut adanya mekanisme *top-down*, sementara pemberdayaan, desentralisasi, pembebasan menuntut adanya mekanisme *bottom-up*. Adanya dualisme paradoksal ini akan menyulitkan bagi kedua-duanya, baik bagi upaya pemantapan birokrasi maupun bagi upaya desentralisasi, pemberdayaan, pembebasan dan partisipasi masyarakat.

6. *Birokrasi Feodalistik*; Peninggalan sisa-sisa budaya penjajahan yang masih sangat kuat melekat pada masyarakat kita ialah budaya feodalistik. Budaya feodalistik ini juga masih melanda kalangan birokrat, sehingga dirokrasi kita sangat kental sekali bernuansa dan berbudaya birokrasi feodalistik, hal ini terbukti dengan masih suburnya budaya ABS/AIS, budaya Gaya Katak, KKN, budaya dilayani bukan melayani, dll-nya. Struk seperti ini sudah barang tentu akan menjadi kendala besar bagi upaya desentralisasi, pemberdayaan, pembebasan dan partisipatif.
7. *Sistem Administrasi Pembangunan*; Unit terkecil sistem administrasi pembangunan kita adalah proyek. Banyak sekali aturan-aturan administrasi dan manajemen proyek yang tidak memberikan iklim yang kondusif bagi ber-

kembangnya penerapan azas desentralisasi, pemberdayaan, pembebasan dan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, sistem kontraktual, pendelegasian otoritas (THWT) yang bersifat hirarkhis dan sentralistik, sistem anggaran, sistem pertanggungjawaban keuangan, dll.

8. Masih banyak kendala-kendala lainnya dalam lingkup struktur dan kultur, uraian di atas hanya beberapa cuplikan saja untuk sekedar memberikan penyadaran bagi kita semua bahwa untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan DAFE-(P) ternyata tidak mudah. Masih terlalu banyak kendala dan hambatan struktural dan kultural yang menghadang dihadapan kita. Dan kendala serta hambatan itu ada di sekeliling lingkungan kita, dan diri kita sendiri.

Kesimpulan

Saya tidak akan menyimpulkan uraian dan paparan saya ini, karena apa yang menjadi kesimpulan itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing, tetapi ia kadang sembunyi dibalik hati nurani.

Saya hanya akan mencoba menarik esensi pernyataan Salmon Padmanagara, Kepala BPLPP (Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian) ke I : Untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan DAFE-(P) diperlukan Pendekar-Pendekar Penyuluhan. (zz)

APRESIASI DAN PELATIHAN LANJUTAN BAGI KOORDINATOR FMA TINGKAT KABUPATEN

Penyuluhan pertanian yang dikelola oleh petani atau *Farmer Managed Activities (FMA)* merupakan salah satu kegiatan Proyek DAFEP yang sangat fundamental. Kelanjutan dari seluruh kegiatan proyek akan dapat dinilai oleh sampai sejauh mana FMA memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan petani dan keluarganya. Dalam tatanan sosial yang lebih luas kesejahteraan keluarga tani merepresentasikan pula strata sosial di daerah atau kabupaten yang memang menjadi sasaran proyek DAFEP selama ini.

Berangkat dari gambaran di atas di tingkat pusat telah dibentuk kelompok kerja yang khusus menangani FMA, sementara untuk pelatihannya masuk ke dalam kelompok kerja HRD (*Human Resources Development*). Hal ini menandakan bahwa kegiatan FMA memang strategis dan relevan dengan kebijakan desentralisasi yang menjadi landasan kebijakan Proyek DAFEP. Di lain pihak, daerah atau bagian proyek di 16 kabupaten peserta DAFEP yang menjadi basis utama kegiatan FMA telah membentuk pula Koordinator FMA yang menangani dan berinteraksi langsung dengan petani sebagai partner dan binaannya.

Koordinator FMA di tingkat kabupaten yang ada sekarang ini sebelumnya telah mendapat pelatihan selama dua minggu di Balai Diklat Pertanian, Soro-

padan, Kabupaten Magelang. Selepas dari pelatihan tersebut para peserta langsung bergelut memberikan binaan kepada para petani yang tergabung dalam UPKG.

Pengalaman di lapangan membuktikan bahwa hasil yang didapat ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan ilmu dan ketrampilan yang didapat selama pelatihan. Disana ada distorsi, di lapangan dihadapkan dengan dinamika sosial masyarakat yang heterogen, latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam. Maka gaya dan improvisasi seorang koordinator FMA menjadi andalan, selain tentunya ketrampilan teknis yang telah dimiliki.

Bahwa Apresiasi dan Pelatihan kali ini banyak menggali pengalaman di lapangan, itu benar. Akumulasi pengalaman di lapangan sungguh sangat relevan sebagai bahan *review* untuk kemudian dikombinasikan dan disempurnakan sesuai dengan dinamika yang hidup tengah masyarakat tani.





Oleh karena itu kurikulum inti dari "Apresiasi dan Pelatihan Lanjutan bagi Koordinator FMA Tingkat Kabupaten" ini dirancang sedemikian rupa agar lebih memperkaya apa yang sudah ada. Dan apapun hasilnya, Apresiasi dan Pelatihan Lanjutan bagi Koordinator FMA Tingkat Kabupaten harus diakui telah menambah lagi ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman para Koordinator FMA di Tingkat Kabupaten.

Pelatihan yang sedianya dibuka oleh Kepala Pengembangan Penyuluhan Pertanian, dibuka secara resmi oleh Kepala Tata Usaha atas nama Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Bioteknologi Pertanian Terapan. Dalam sambutannya beliau memaparkan tugas dan fungsi balai dalam kaitannya dengan pembangunan

pertanian, khususnya di DIY dan umumnya di tanah air. Lebih jauh beliau menyatakan kegembiraannya atas diselenggarakannya pelatihan dimaksud yang berada di wilayahnya yang juga mengikutsertakan salah seorang widyaiswaranya sebagai fasilitator. Dan sebagai kata penutup beliau mengucapkan selamat berlatih dan dapat menikmati suasana Yogyakarta dengan segala keunikannya.

Pada sesi pertama diisi oleh penyampaian Hasil supervisi MTR dan Rencana Kegiatan DAFEP yang disampaikan oleh Ir. Zahir Zachri, MA.

Dalam uraiannya beliau merinci hasil-hasil supervisi MTR yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan waktu yang direkomendasikan oleh Tim supervisi.

Lanjutan sesi berikutnya diisi dengan

materi Penyegaran dan Apresiasi pemahaman PRA dan Profil Keluarga yang juga dibawakan oleh Ir. Zahir Zachri, MA. Dalam paparannya beliau mengupas banyak teknik-teknik pendekatan yang memerlukan kreatifitas dan improvisasi dari setiap Koordinator FMA dan jajarannya. Ditengah proses penyampaian materi tersebut digali pula pengalaman-pengalaman di lapangan dari para Koordinator FMA sehingga dapat memperkaya pembahasan yang lebih komprehensif sebagai bekal pelaksanaan FMA berikutnya. Ir. Zahir menggambarkan bagaimana sulitnya mengubah suatu kebiasaan dengan memberikan suatu analogi menulis dengan tangan kiri jauh lebih sulit bila dibanding dengan menulis dengan tangan kanan. Kesulitan ini akibat kebiasaan yang selalu menggunakan tangan kanan.

Sesi pembahasan RUK, RKK, RKPd merupakan materi yang banyak menyita perhatian, baik dari pihak fasilitator maupun dari pihak peserta. Terkadang pula diwarnai dengan diskusi dan debat yang cukup alot namun tetap dinamis. Apa yang disampaikan fasilitator ternyata yang secara empiris dialami di lapangan jauh lebih berat dan melelahkan dibanding yang diajarkan di dalam kelas. Terkait dengan pokok bahasan, dalam sesi ini pun para peserta dituntut untuk meram-pungkan Juknis yang akan digunakan oleh petani petandu pada saat praktek lapang.

Materi pelatihan Agro-forestry disampaikan oleh Mantan Kepala Pusat Pembinaan Penyuluhan Kehutanan. Dalam sesi ini dibahas kemungkinan pengembangan usahatani budidaya tanaman yang sesuai dengan kawasan hutan, baik dari kondisi agroklimat maupun dari kesinambungan

kelestarian hutan sekitarnya tanpa harus merusak dan merambah kawasan hutan yang ada di sekitar tempat usahatani para petani.

Pengarusutamaan jender umumnya telah dikenal dan dipahami oleh peserta dengan baik. Sesi ini dimanfaatkan untuk menggali dan mendiskusikan pemecahan masalah-masalah yang ditemui oleh peserta di kabupatennya masing-masing. Para peserta mampu mengajukan banyak contoh pengarusutamaan jender yang dapat disisipkan pada berbagai kegiatan FMA.

Praktek Lapang I dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Peserta dibagi ke dalam 2 kelompok : Kelompok 1 di UPKG "SELOMIORO", Desa Selomioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Kelompok 2 di UPKG "GUOSARI", Desa Guosari, Kecamatan Panjangan, Kabupaten Bantul. Pada praktek lapang ini diujicobakan petunjuk teknis memandu penyusunan PRA dan perencanaan partisipatif yang telah disusun oleh peserta apresiasi. Sebelum pemanduan dilakukan oleh pemandu setempat, pemandu diberikan waktu lebih kurang 30 menit untuk mempelajari juknis. Pemandu diminta mengikuti langkah-langkah demi langkah yang tertera pada Juknis. Peserta apresiasi mengamati dan mencatat kejadian selama proses kepemanduan berlangsung untuk melihat keefektifan dan kelemahan Juknis. Di kedua UPKG kepemanduan berlangsung dengan baik meskipun terjadi sedikit ketidaklancaran sehubungan dengan suasananya yang berbeda dengan suasana yang sesungguhnya, namun dalam penyampaian materi dapat terlaksana dengan relatif memuaskan.

Praktek Lapang II. untuk materi Sekolah Lapang (SL) berlangsung dan dilaksanakan di UPKG "SELOPROJO" Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Suatu tempat dataran tinggi di kaki Gunung Sindoro dengan hamparan sawah dan kebun sayuran serta jenis tanaman hortikultura lainnya. Praktek lapang yang dilaksanakan di UPKG SELOPROJO Desa Seloprojo berlangsung dengan lancar, penuh kedinamisan. Yang dilakukan peserta adalah mengobservasi dan tanya jawab dengan beberapa petani dan Ketua UPKG.

Selain materi inti dari SL tersebut, keswadayaan dan keswadanaan dari UPKG ini mendapat apresiasi yang tinggi dari setiap peserta. Mendatangkan petani dari Pangalengan, Bandung dalam me-

nanggulangi penyakit bintil akar pada tanaman kubis misalnya, adalah bentuk nyata dari bagaimana UPKG ini menggalang keswadanaan dalam mendatangkan ahlinya.

Materi hasil dari praktek lapang didiskusikan kembali di dalam kelas yang dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan aspek yang diobservasi oleh masing-masing peserta. Studi petani misalnya, menjadi pokok diskusi kelompok yang menelusuri proses terjadinya mengapa petani melakukan studi di lahan usahatannya. Lantas bagaimana pula bila hasil studi tersebut agar diketahui oleh seluruh anggota yang tergabung dalam UPKG dan bahkan oleh petani-petani lain di sekitarnya.

Pada sesi ini para peserta mengobser-



vasi bagaimana cara penyebaran informasi dapat sampai kepada anggotanya, kemudian pilihan media yang digunakan yang dapat menarik dan menggugah para anggotanya. Aspek sosialisasi tidak juga luput dari pengamatan peserta. Banyak hal yang terungkap, ternyata dari kegiatan pertemuan-pertemuan atau forum dengan para pejabat di Pemerintahan Daerah gaung sosialisasi jauh lebih menyebar dan dampak yang ditimbulkannya mampu menjangkau radius level birokrasi dan jajaran di bawahnya. Tidak itu saja, dari pertemuan dengan pejabat Pemda membuka peluang mengalirnya partisipasi dana untuk kegiatan pembelajaran anggota.

Hasil dari rumusan tiap kelompok, dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing dalam pleno terbuka untuk mendapat masukan yang lebih sempurna.

Materi monitoring dan evaluasi memfokuskan diri pada cara bagaimana memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan FMA pada semua tingkatan, mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat kabupaten yang selanjutnya disampaikan ke pusat. Meskipun untuk kebutuhan pelaporan ke Bank Dunia tersedia format-format baku, pada level-level tertentu dimungkinkan daerah mengembangkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Dari hasil monitoring dan evaluasi, seperti yang disampaikan oleh Konsultan Monev sebagai narasumber dapat disusun dalam buku laporan yang merupakan gambaran utuh dari suatu kegiatan. Laporan, menurutnya bukan sekedar penyampaian informasi jenis-jenis kegiatan fisik tapi juga harus berisikan tinjauan analisis dengan deskripsi output yang jelas dan realistis

berdasarkan nilai kualitas dan kuantitas yang terukur.

Analisa Usahatani merupakan salah satu sesi yang berbeda dari analisa usahatani yang dikenal sebelumnya. Analisa usaha yang banyak dikenal adalah memasukkan input usaha berupa modal tetap ke dalam unsur yang dikalkulasikan besaran investasi yang dikelola ke dalam proses produksi dan belakangan modal tetap (fixt investment) tersebut dihitung kembali.

Menurut Analisa Usahatani dalam materi ini bila modal tetap kemudian dihitung kembali maka akan terjadi duplikasi perhitungan dan akan terjadi bias perhitungan besarnya laba rugi. Adanya perhitungan analisa yang baru dikenalkan, mendapat respond yang cukup positif dari para peserta dan diskusipun menjadi hidup dan menarik apalagi diwarnai dengan tawaran-tawaran metoda yang direpresentasikan melalui rumus-rumus matematis yang aplikatif.

Verifikasi Proposal

Peserta yang dibagi kedalam beberapa kelompok mendiskusikan persyaratan umum dan khusus yang harus ada pada setiap proposal kegiatan FMA. Mulai dari tujuan, metodologi, peserta, hingga pada indikator keberhasilannya.

Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Pada akhir kegiatan, setiap Kabupaten diwajibkan menyusun RTL yang harus ditindaklanjuti segera setelah peserta tiba di kabupaten masing-masing. (r-one)

Lokakarya Perencanaan Model Penyuluhan Pertanian dalam Pemberdayaan Wanita Tani dan Pemuda Tani di Kabupaten Kupang

Pembangunan daerah yang diamanatkan GBHN adalah mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat. Masyarakat disini terutama adalah petani, yang terdiri dari petani dewasa (Bapak taninya), wanita tani (istri petani), dan pemuda tani (anak petani).

Dengan demikian perlu perhatian khusus untuk memberdayakan petani dewasa, wanita tani, dan pemuda tani. Tetapi pada umumnya perhatian lebih besar adalah pada petani dewasa. Wanita tani dan pemuda tani kurang mendapat perhatian. Padahal dalam kegiatan usahatani tak sedikit peran wanita tani dan pemuda tani. Apalagi pemuda tani sebagai generasi penerus yang menggantikan orang tuanya dalam berusahatani. Dengan alasan seperti di atas dan sekitar 80% penduduk bekerja di sektor pertanian, maka di Kabupaten Kupang diadakan Lokakarya Perencanaan Model Penyuluhan (PMP) terhadap wanita tani dan pemuda tani. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Sanggar Gailaru Marada (Yasagama).

Tujuan Kegiatan

a. Tujuan Umum

Terciptanya kondisi ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat desa, melau-

lui peningkatan aktivitas ekonomi pedesaan, yang akhirnya dapat menciptakan kesempatan kerja produktif/kesempatan berusaha.

b. Tujuan Khusus

1. Memperoleh database tentang : keadaan faktual sistem agribisnis di desa, jenis dan macam kegiatan wanita tani dan pemuda tani, masalah, harapan, dan kebutuhan usaha bersama yang meningkatkan pendapatan.
2. Menghasilkan dokumen perencanaan Model Penyuluhan Pertanian untuk sasaran wanita tani dan pemuda tani sesuai dengan kebutuhan.

Kegiatan Wanita Tani

- Lokarya kegiatan adalah desa Noelbaki dan desa Baumata, Kecamatan Kupang Tengah. Potensi kedua desa tersebut yang dapat ditingkatkan adalah sayuran organik, dan peluang pasarnya adalah pasar swalayan setempat/lokal dan pasar swalayan di Ujung Pandang dan Timika.

Peserta Lokakarya ini adalah 21 orang wanita tani yang dinilai mampu membuat perencanaan penyuluhan pertanian, dan mampu pula mengelola kegiatan penyuluhan/pembinaan lanjutan.

- Pada awal kegiatan, setelah penyampaian materi sosialisasi kegiatan, dilakukan curahan tanggapan peserta. Dari hasil curahan tersebut peserta menyambut gembira kegiatan tersebut, karena selama ini kurang mendapat perhatian khusus, sehingga masalah-masalah yang dirasakan tak dapat dipecahkan, dapat terpecahkan. Selain itu mereka merasa ada peluang untuk meningkatkan pendapatannya.

Masalah-masalah yang mereka rasakan adalah :

- Masih adanya praktek "ijon".
- Adanya pergeseran permintaan ke sayuran organik.
- Mutu benih sayuran rendah.
- Kualitas sayur yang rendah karena penggunaan pupuk organik.
- Beralih fungsinya pasar di desa Noelbaki menjadi penampungan pengunjung.

Setelah itu dilakukan "kontrak belajar" antara fasilitator dan peserta, sehingga terjadi kesepakatan untuk mengikuti lokakarya sampai membuat perencanaan Model Penyuluhan Pertanian dengan fokus Pengembangan Agribisnis Sayuran (Organik dan non Organik).

- Dihasilkan profil keluarga wanita tani peserta lokakarya yang terdiri dari; keahlian, pengeluaran pertanian, luas dan jenis lahan yang diusahakan, komoditas yang diproduksi, serta pendapatan dan pengeluaran rumah tangga untuk pertanian. Dari data tersebut terlihat masih bisa usahataniannya dikembangkan melalui perluasan areal penanaman, penambahan jenis tanaman, intensifikasi, dan pengolahan hasil.
- Melakukan evaluasi potensi, masalah,

peluang dan tantangan pengembangan agribisnis di tingkat keluarga. Di desa Noelbaki terdapat tantangan kebutuhan pengembangan usaha, kebutuhan benih sayuran bermutu, memerlukan pengembangan sesuai permintaan, membutuhkan modal, perlu peningkatan kemampuan SDM.

Sedang di desa Baumata, memerlukan penambahan peralatan, perlu produksi benih unggul, perlu teknik pemberantasan hama dan penyakit, memerlukan pompa dan selang air, perlu teknik pengairan yang efisien, dituntut menghasilkan sayuran yang berkualitas dan dikemas dengan baik, perlu tambahan modal, dan peningkatan kemampuan SDM.

- Membuat rencana kegiatan kelompok tahun 2003. Untuk desa Noelbaki dan Baumata rencananya:
 - Membentuk kelompok usaha bersama agribisnis sayuran dengan anggaran dasar dan rumah tangganya.
 - Memperluas areal penanaman.
 - Pengembangan agribisnis dan pengadaan sarananya.
 - Pengembangan jaringan kemitraan.

Kegiatan Pemuda Tani

Lokasi kegiatan adalah desa Bakuin dan desa Nunuranah Kabupaten Kupang. Potensi kedua desa tersebut yang mempunyai prospek untuk dikembangkan menjadi komoditi unggulan adalah asam. Selama ini asam belum dipanen secara maksimal, padahal punya potensi mutu pemasaran antar pulau atau keluar negeri. Jumlah peserta pemuda tani dari kedua desa tersebut 22 orang. Terdiri dari pe-

muda tani potensial yang mampu secara aktif mengikuti lokakarya. Setelah acara penyampaian materi sosialisasi, peserta umumnya tanggapannya senang terhadap lokakarya, karena :

- Pertama kali kegiatan yang khusus untuk pemuda tani, dan dilibatkan dalam proses perencanaan program penyuluhan pertanian. Selama ini mereka hanya mendapat instruksi.
- Mereka mendapat pengetahuan agribisnis, dan sadar bahwa mereka mengabaikan potensi yang ada. Produksi asam melimpah, tetapi tidak semua dipanen. Perencanaan Model Penyuluhan yang dilakukan adalah mengenai Pengembang-

an Agribisnis asam, dan kegiatan yang direncanakan :

- Pembentukan kelompok usaha bersama "Agribisnis Ayam". Sebelumnya di kedua desa tersebut belum terbentuk kelompok tani. Akan disusun juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Membangun "gudang asam" dengan swadaya secara gotong royong. Dan membuat bakul dan tikar anyaman.
- Mengusulkan pengembangan jaringan kemitraan dengan pihak swasta dan instansi terkait dalam pengolahan dan pemasaran hasil. (fs)

Temu Usaha, Kemitraan dan Pembentukan Jaringan Program PHRD-DAFEP Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Kegiatan temu usaha, kemitraan dan pembentukan jaringan merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pendampingan dan penguatan UPKG oleh Yayasan Bina Swadaya. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan bantuan pemecahan masalah dalam pemasaran dan kebutuhan modal tambahan bagi usaha tani yang dikelola oleh masyarakat petani.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Wisma Duta Wacana, Kaliurang Yogyakarta tepatnya tanggal 12 - 13 Mei 2003. Hadir pada pertemuan tersebut para wakil dari 3 kabupaten yaitu kabupaten Mage-

lang, Bantul dan Kulon Progo. Mereka diantaranya adalah para pengurus UPKG, sejumlah nara sumber dari pihak Perbankan ke tiga kabupaten tersebut, praktisi pemasaran produk empon-empon (Ibu Rini), perwakilan Kantor Pengelola DAS Progo Hulu (Bapak Dirgantara), P4S Putra Bangsa (Bapak Ngadimin) dan sejumlah peserta lainnya seperti penyuluh dan petugas lainnya.

Ada dua materi yang didiskusikan pada acara pertemuan tersebut yaitu 1) *permodalan*, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang sumber-sumber permodalan yang dapat di akses oleh

petani untuk pengembangan usaha tani beserta dengan segala aturan dari masing-masing penyedia permodalan, dan 2) *pemasaran dan pembentukan jaringan*, tujuannya adalah agar peserta mendapatkan gambaran bagaimana dan kemana memasarkan hasil produksinya serta peluang kerja sama yang dapat ditindak lanjuti.

Dari proses diskusi panel selama 2 hari, secara garis besar dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut:

Permodalan

- a. Pihak perbankan siap melayani kebutuhan tambahan modal dari petani di masing-masing kabupaten baik pinjaman modal secara pribadi maupun secara kelompok.
- b. Ajuan harus dilengkapi dengan analisa usaha.
- c. Kredit diberikan untuk tambahan modal dan bukan untuk modal awal (dengan kata lain bahwa petani sudah melakukan usaha taninya dan bukan merupakan usaha coba-coba).
- d. Suku bunga merupakan suku komersial dengan aturan peminjaman sesuai dengan kebijakan masing-masing perbankan.
- e. Kredit kelompok dapat dilayani dengan menggunakan mekanisme PHBK (pola Hubungan Bank dengan Kelompok). Mekanisme PHBK ini memberikan tambahan keuntungan karena dapat mengurangi jaminan fisik dan digantikan dengan sistem tanggung renteng. Pola ini yang digunakan oleh BPR JAS dan BPR BKK Sawangan dalam memfasilitasi kelompok-kelompok dampingan Bina Swadaya. Dalam

hal ini maka Bina Swadaya dapat dimintai rekomendasi apabila kelompok tani di desa PHRD akan mengajukan kredit kepada perbankan.

Pemasaran dan Pembentukan Jaringan

- a. Dari Balai Pengelolaan DAS Progo Hulu didapatkan informasi tentang kerjasama untuk pengelolaan hutan bersama petani sekitar hutan dalam bentuk kerjasama PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).
- b. Dari praktisi pemasaran empon-empon didapatkan teknologi praktis pengepakan empon-empon, pengemasan dan teknik penjualan empon-empon. Praktisi ini juga siap menampung empon-empon kering berbagai jenis. Didapatkan informasi pasar yang lebih luas untuk pemasaran empon-empon.
- c. Dari P4S Putra Bangsa memberikan tawaran kerjasama kepada peserta yaitu penanaman hortikultura dengan sistem kemitraan. P4S akan menyediakan sarana produksi, bibit, bimbingan teknis dan pasar. Petani diharapkan menyediakan lahan, pupuk kandang dan tenaga. Sistem pembagian hasil adalah 50% : 50%.

Selain itu, sebagai hasil dari pertemuan tersebut ke tiga kabupaten merencanakan tindak lanjut berupa sosialisasi hasil pertemuan, penjajagan, pemantapan dan pembentukan jaringan UPKG untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, koordinasi dan mengadakan pertemuan lanjutan untuk membahas masalah permodalan, pemasaran dan jaringan program PHRD DAFEP pada masing-masing kabupaten. (bgn)

DAFEP DALAM GAMBAR

Kunjungan kerja ke kelompok binaan DAFEP



Mentan, Bungaran Saragih dalam kunjungan kerja ke Kab. Bantul menyempatkan diri mengunjungi kelompok tani binaan DAFEP.



Mentan berbincang dengan Bupati Bantul dalam kunjungan kerja ke Propinsi DIY yang didampingi oleh Kapus Bangluhtan Dr. Amrin Zakaria

Supervisi Bank Dunia



Tim Supervisi Bank Dunia



Tim Supervisi Bank Dunia saat mengunjungi salah satu UPKG binaan DAFEP

Pelatihan Web Site dan Upgrading MIS & MES



Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian beramah tamah dengan peserta pelatihan Web Site dan Upgrading MIS & MES.



Peserta pelatihan Web Site dan Upgrading MIS & MES menyiapkan diri untuk menerima materi dari fasilitator.



Peserta pelatihan mempraktekkan pembuatan Web Site.



Fasilitator memonitor hasil praktek peserta.

